



TAHUN 2022 LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

**SEKRETARIAT DAERAH
KOTA PASURUAN**

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga dapat menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat Daerah Kota Pasuruan Tahun 2022, yang merupakan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun pertama dari Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021-2026. Pembuatan LKjIP merupakan tindak lanjut Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Daerah Kota Pasuruan Tahun 2022 menguraikan pencapaian kinerja tahun sebelumnya dan juga merupakan media pertanggungjawaban keberhasilan dan atau beberapa kinerja yang belum tercapai secara maksimal dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis dalam pencapaian visi dan misi organisasi sesuai Rencana Kinerja yang telah di tetapkan.

Substansi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai instrument untuk menginformasikan pencapaian kinerja Sekretariat Daerah Kota Pasuruan dalam Tahun 2022 yang menyangkut tentang proses pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2022, yang sekaligus merupakan Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Daerah Kota Pasuruan dan merupakan mata rantai pencapaian kinerja yang telah dilaksanakan pada tahun-tahun sebelumnya.

Dengan dibuatnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Daerah Kota Pasuruan tahun 2022 kiranya dapat memberikan informasi yang akurat, tepat, relevan, transparan, sehingga pihak-pihak yang berkepentingan dapat mengambil manfaat dan menilai pencapaian Kinerja Sekretariat Daerah Kota Pasuruan dalam kurun waktu satu tahun di Tahun 2022.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu hingga tersusunnya LKjIP Sekretariat Daerah Kota Pasuruan Tahun 2022, semoga bermanfaat dan berguna untuk pelaksanaan tugas-tugas dan semakin memacu Kinerja Sekretariat Daerah Kota Pasuruan dimasa yang akan datang. Namun kami menyadari dalam pembuatan dan/atau penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Daerah Kota Pasuruan Tahun 2022 ini ada beberapa kesalahan dan kekurangan yang akan kami perbaiki dengan komitmen penuh dari seluruh stakeholders dan komponen yang ada di Sekretariat Daerah Kota Pasuruan.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pasuruan, 31 Januari 2023
SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN



IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat Daerah Kota Pasuruan sebagai implementasi sistem akuntabilitas yang merupakan bentuk pertanggungjawaban Kinerja Sekretariat Daerah atas penyelenggaraan. Namun pertanggungjawaban ini tidak semata-mata dimaksudkan sebagai upaya untuk menemukan kelemahan pelaksanaan pemerintahan daerah melainkan juga untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, produktivitas dan akuntabilitas Sekretariat Daerah Kota Pasuruan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dari Sekretariat Daerah Kota Pasuruan merupakan bentuk pertanggungjawaban dari Perencanaan Strategik, yang dituangkan dalam bentuk tahapan kegiatan yang terarah dan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan kinerja Sekretariat Daerah Kota Pasuruan.

Pertanggungjawaban suatu Instansi Pemerintah kepada Publik pada prinsipnya merupakan kewajiban Pemerintah untuk menjelaskan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan kepada masyarakat. Pertanggungjawaban ini tidak semata-mata dimaksudkan sebagai upaya untuk menemukan kelemahan pelaksanaan Pemerintahan, melainkan juga untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, produktivitas dan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintahan serta fungsi pengawasan publik terhadap jalannya Pemerintahan.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan kewajiban Sekretariat Daerah Kota Pasuruan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis Sekretariat Daerah Kota Pasuruan Tahun 2021 – 2026.

Pengukuran pencapaian kinerja Sekretariat Daerah Kota Pasuruan dilakukan dengan membandingkan antara rencana kinerja (Performance plan) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (Performance Result) yang dicapai oleh organisasi yang bersangkutan. Hasil pengukuran ini bermanfaat untuk memberikan gambaran kepada pihak-pihak eksternal tentang pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan untuk mewujudkan Visi dan Misi Wali Kota Pasuruan. Apabila terjadi perbedaan antara rencana kinerja dengan realisasinya maka harus dicari penyebabnya dan menentukan strategi untuk mengatasi masalah tersebut.

Tahun 2022 merupakan tahun pertama dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Kota Pasuruan periode tahun 2021-2026. Secara umum pencapaian sasaran melalui indikator-indikator sasaran menunjukkan keberhasilan untuk mewujudkan misi dan tujuan sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra). Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat Daerah Kota Pasuruan Tahun 2022 ini menyajikan hasil pengukuran, evaluasi dan analisis pencapaian sebagai berikut :

Sasaran strategis yang telah ditetapkan di dalam Rencana Strategis (Renstra) Periode tahun 2021-2026, pengukuran, evaluasi dan analisis capaian sasaran strategis pada tahun 2022 telah dapat direalisasikan dengan baik sekali. Keberhasilan pencapaian sasaran ini tidak terlepas dari komitmen penuh dari Sekretaris Daerah di samping adanya koordinasi dan sinergi dengan pihak terkait

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) periode tahun 2021-2026 yang secara keseluruhan sudah dilaksanakan dengan baik. Keberhasilan dan kekurangan yang telah dicapai selama tahun 2022 telah memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi Sekretariat Daerah Kota Pasuruan untuk meningkatkan kinerja di masa-masa mendatang.

Dalam rangka peningkatan kinerjanya, pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat Daerah Kota Pasuruan untuk Rencana Strategis (Renstra) yang akan datang yaitu tahun 2021-2026 akan difokuskan pada saran-saran dan indikator yang telah ditetapkan, yaitu Nilai SAKIP, Prosentase Rumusan Kebijakan yang ditindaklanjuti, SKM Pelayanan Sekretariat Daerah.

DAFTAR ISI

| | |
|--|-----------|
| KATA PENGANTAR | i |
| IKHTISAR EKSEKUTIF | ii |
| DAFTAR ISI | iv |
| DAFTAR TABEL | v |
| BAB 1 PENDAHULUAN | 1 |
| 1.2 Latar Belakang | 2 |
| 1.2.1 Struktur Organisasi | 2 |
| 1.2.2 Tugas Pokok dan Fungsi | 5 |
| 1.2.3 Isu Strategis | 7 |
| 1.2.4 Dasar Hukum | 6 |
| 1.3 Sistematika Penyajian | 8 |
| BAB 2 PERENCANAAN KINERJA | 10 |
| 2.1 Perencanaan Strategis | 10 |
| 2.1.1 Visi dan Misi Wali Kota | 10 |
| 2.2 Tujuan dan Sasaran | 14 |
| 2.3 Indikator Kinerja Utama | 16 |
| 2.4 Perjanjian Kinerja | 17 |
| 2.5 Perencanaan Anggaran | 18 |
| BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA | 24 |
| 3.1 Capaian Target Sasaran Strategis | 24 |
| 3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja | 25 |
| 3.3 Perbandingan Capaian Kinerja Perangkat Daerah | 42 |
| 3.4 Akuntabilitas Keuangan | 43 |
| 3.5 Analisis Program / Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian pernyataan Kinerja | 47 |
| BAB 4 PENUTUP | 58 |
| 4.1 KESIMPULAN | 58 |
| 4.2 SARAN | 59 |

DAFTAR ISI

| | |
|--|----|
| Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran Sebelum perubahan | 15 |
| Tabel 2.2 Tujuan dan Sasaran Sesudah perubahan | 15 |
| Tabel 2.3 Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah Sebelum Perubahan | 16 |
| Tabel 2.4 Indikator Kinerja Utama Sekretaris Daerah Perubahan Ke 2 | 16 |
| Tabel 2.5 Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Sebelum Perubahan 2022 | 17 |
| Tabel 2.6 Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Sesudah Perubahan 2022..... | 18 |
| Tabel 2.7 Tabel Perencana Anggaran 2022..... | 23 |
| Tabel 3.1 Capaian Kinerja Sekretariat Daerah Sebelum Perubahan Tahun 2022 | 24 |
| Tabel 3.2 Capaian Kinerja Sekretariat Daerah Sesudah Perubahan Tahun 2022 | 25 |
| Tabel 3.3 Sasaran ke 1 “Meningkatannya kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah” .. | 25 |
| Tabel 3.4 Sasaran ke 2 “Meningkatnya Tertib Adminitrasi Pemerintah” | 34 |
| Tabel 3.5 Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja Sebelum Perubahan | 42 |
| Tabel 3.6 Perbandingan Realisasi Kinerja Perubahan | 42 |
| Tabel 3.7 Realisasi Anggaran | 46 |
| Tabel 3.8 Kesimpulan Realisasi Anggaran dan Kinerja | 57 |

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintahan Provinsi dan Kabupaten/Kota menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan Pemerintah. Berdasarkan Undang-Undang tersebut, terdapat 24 (dua puluh empat) urusan wajib dan 8 (delapan) urusan pilihan yang harus ditangani Pemerintah Daerah. Dalam menjalankan tugasnya Pemerintah Daerah menjalankan otonomi yang seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Otonomi ini dilakukan berdasarkan prinsip demokrasi yaitu mendorong akuntabilitas pemerintah kepada rakyat.

Sekretariat Daerah Kota Pasuruan dibentuk dengan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pasuruan. Dalam melaksanakan tugasnya Sekretariat Daerah Kota Pasuruan berpedoman pada Peraturan Wali Kota Pasuruan Nomor 4 Tahun 2022 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Pasuruan Nomor 95 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 4 Tahun 2022 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat Daerah Kota Pasuruan Tahun 2022 ini merupakan bentuk dokumentasi pertanggungjawaban tahunan dengan berdasarkan pada:

1. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999;
2. Peraturan Menteri Pendahayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014; dan
3. Surat Keputusan Kepala LAN (Lembaga Administrasi Negara) Nomor 239 Tahun 2003.

Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2017 ini disusun dengan memperhatikan berbagai kondisi dan permasalahan yang dihadapi. Permasalahan yang timbul dan mungkin akan timbul (deteksi dini) menyangkut kondisi internal, kondisi eksternal baik regional, nasional maupun internasional.

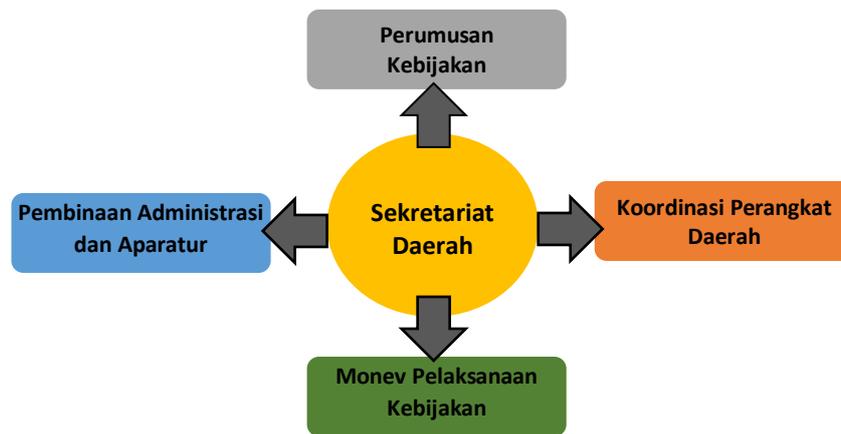
Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat Daerah Kota Pasuruan, maka diharapkan:

1. Meningkatkan kualitas Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Daerah Kota Pasuruan;
2. Meningkatkan komitmen dan kerjasama baik dengan Inspektorat, Bapelitbangda,
3. BPKAD dengan seluruh bagian maupun seluruh Perangkat Daerah sehingga kerjasama dengan manajemen kinerja berjalan sebagaimana yang diharapkan, mencakup perencanaan kinerja, pelaksanaan kinerja hingga pada evaluasi kinerja;
4. Menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan dengan baik, benar dan transparan serta dapat dipertanggungjawabkan kepada pimpinan dan masyarakat.

1.2 STRUKTUR ORGANISASI DAN PENJELASAN UMUM ORGANISASI

1.2.1 STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pasuruan dan Peraturan Wali Kota Pasuruan Nomor 4 Tahun 2022 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Pasuruan Nomor 95 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 4 Tahun 2022 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah, maka Sekretariat Daerah Kota Pasuruan mempunyai tugas dan kewajiban membantu Wali Kota dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan perangkat daerah. Dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban tersebut, Sekretariat Daerah Kota Pasuruan mempunyai fungsi:



Gambar 1.1 Fungsi Sekretariat Daerah

Sekretariat Daerah Kota Pasuruan dipimpin Sekretaris Daerah yang dibantu oleh 3 (tiga) Asisten membawahi 9 (Sembilan) Bagian dengan 25 (Dua Puluh Lima) Subbagian dengan susunan organisasi sebagai berikut:

ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

a. Bagian Hukum, membawahi:

1. Perancang Aturan Perundang-undangan Ahli Muda;
2. 2 (dua) orang Penyuluh Hukum Ahli Muda.

b. Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan, membawahi:

1. 2 (dua) orang Pembimbing Kemasyarakatan Ahli Muda.

c. Bagian Administrasi Pemerintahan, membawahi:

1. 3 (tiga) orang Analis Kebijakan Ahli Muda

ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN

a. Bagian Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam, membawahi:

1. Analis Kebijakan Ahli Muda;
2. Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda; dan
3. Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Muda;

b. Bagian Administrasi Pembangunan, membawahi:

1. 3 (tiga) orang Analis Kebijakan Ahli Muda.

c. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, membawahi:

1. 2 (dua) orang Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa Ahli Muda.

ASISTEN ADMINISTRASI UMUM

a. Bagian Umum, membawahi:

1. Analis Kepegawaian Ahli Muda;
2. Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa Ahli Muda ; dan
3. Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda.

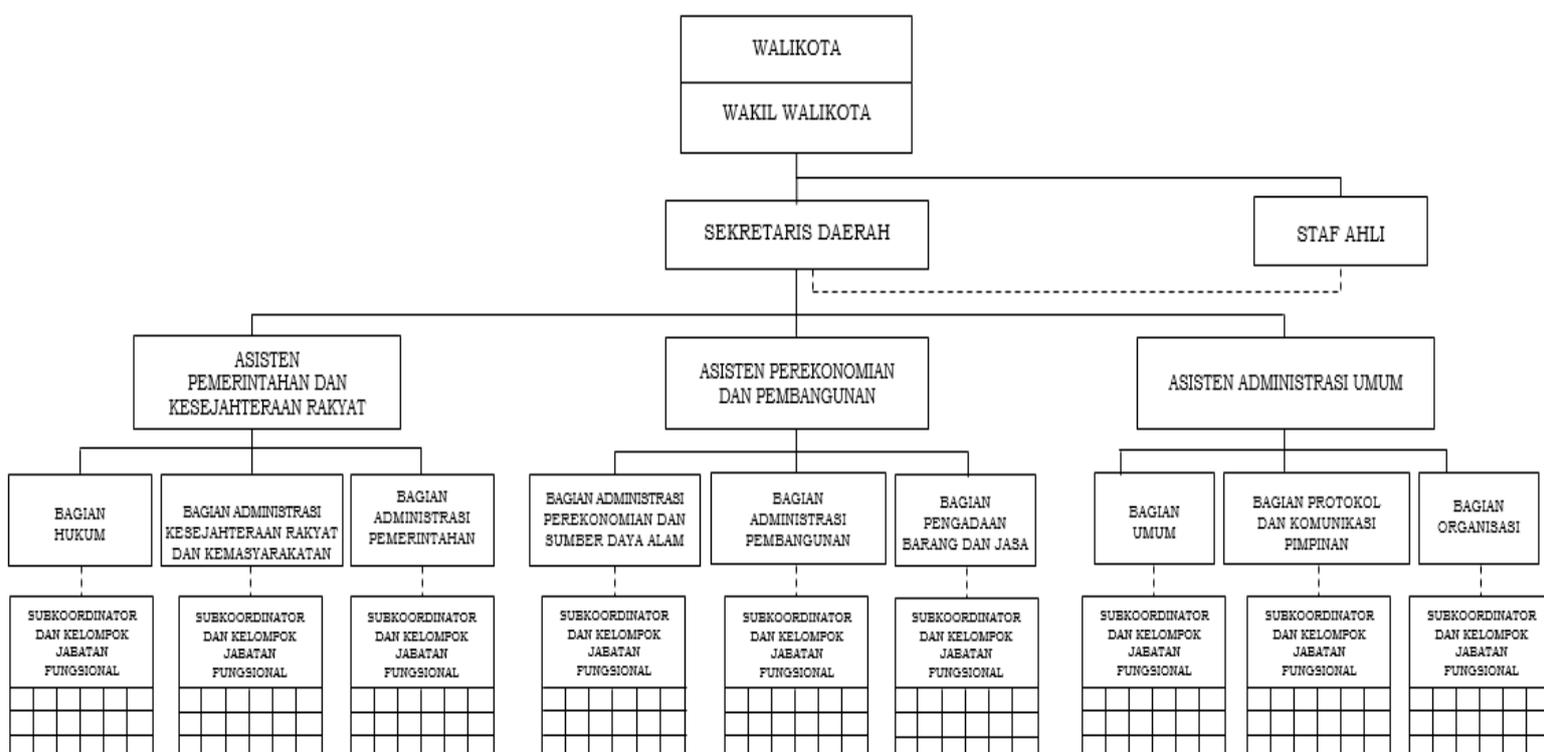
b. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, membawahi:

1. 3 (tiga) orang Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda

c. Bagian Organisasi, membawahi:

1. 3 (tiga) orang Analis Kebijakan Ahli Muda

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH DAN STAF AHLI



Tabel 1.2 Struktur Organisasi di sekretariat Daerah

Pada bagian ini menjelaskan sumber dan besaran anggaran yang dimiliki oleh
Sekretariat Daerah Kota Pasuruan

| Sumber | Tahun | Jumlah |
|--------|------------|--------------------|
| (1) | (2) | (3) |
| APBD | Tahun 2021 | Rp. 42.444.206.947 |
| APBD | Tahun 2022 | Rp. 40.020.420.695 |

1.2.2 TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat Daerah Kota Pasuruan berpedoman pada Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pasuruan dan Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 4 Tahun 2022 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 95 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 4 Tahun 2022 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah. merupakan kumpulan dari urusan pemerintahan yang diampu oleh Sekretaris Daerah sebagai pimpinan tertinggi yang dibantu oleh 3 (tiga) orang Asisten dan dibagi 9 (Sembilan) Bagian. Adapun pembagian tugas pokok dan fungsi di lingkup Sekretariat Daerah Kota Pasuruan adalah sebagai berikut:

- a. **Sekretaris Daerah** mempunyai tugas pokok membantu Wali Kota dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.
- b. **Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat** mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam penyusunan kebijakan daerah di bidang pemerintahan dan hukum, dan pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah di bidang kesejahteraan rakyat.
 1. **Bagian Hukum** mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang perundang-undangan, bantuan hukum dan dokumentasi dan informasi.
 2. **Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan** mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakam daerah di bidang keagamaan, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat.
 3. **Bagian Administrasi Pemerintahan** mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah, pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang

administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan dan kerja sama dan otonomi daerah.

c. **Asisten Perekonomian dan Pembangunan** mempunyai tugas membantu sekretaris daerah dalam penyusunan kebijakan Daerah dan pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah di bidang perekonomian dan sumber daya alam, administrasi pembangunan dan pengadaan barang dan jasa.

1. **Bagian Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam** mempunyai tugas pokok melaksanakan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pembinaan Badan Umum Milik Daerah (BUMD) dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), perekonomian, dan sumber daya alam.

2. **Bagian Administrasi Pembangunan** mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Penyusunan Program, Pengendalian Program dan Evaluasi dan Pelaporan.

3. **Bagian Pengadaan Barang dan Jasa** mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa.

d. **Asisten Administrasi Umum** mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam pelaksanaan kebijakan, penyusunan kebijakan daerah dan pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah di bidang umum, organisasi, protokol dan komunikasi pimpinan.

1. **Bagian Umum** mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan pelaksanaan kebijakan dan pemantauan dan evaluasi di bidang tata usaha pimpinan, staf ahli dan kepegawaian, keuangan, rumah tangga dan perlengkapan.

2. **Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan** mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan pelaksanaan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang protokol, komunikasi pimpinan, dan dokumentasi

3. **Bagian Organisasi** mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan

daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana, dan kinerja dan reformasi birokrasi.

1.2.3 ISU STRATEGIS

Permasalahan utama yang menjadi isu strategis Sekretariat Daerah Kota Pasuruan adalah tingginya harapan Perangkat Daerah sebagai pelaksana kebijakan terhadap kebijakan yang dihasilkan oleh Sekretariat Daerah guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sebagai tolak ukur percepatan capaian reformasi birokrasi untuk menuju *good governance*.

1.2.4 DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusidan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
5. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
8. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pasuruan Tahun 2021-2026.

9. Peraturan Wali Kota Pasuruan Nomor 95 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 4 Tahun 2022 tentang Tugas Pokok dan fungsi Sekretariat Daerah.

1.3 SISTEMATIKA PENYAJIAN

Sistematika penyajian Laporan Kinerja sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Menjelaskan ringkasan/ikhtisar Perjanjian Kinerja tahun 2022 yang berdasarkan pada dokumen perencanaan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;

7. Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja).

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

LAMPIRAN

- 1) Perjanjian Kinerja
- 2) Lain-lain yang dianggap perlu

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 PERENCANAAN STRATEGIS

Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Kota Pasuruan adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistimis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada visi dan misi kepala daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh daerah yang bersangkutan. Rencana strategis Sekretariat Daerah Kota Pasuruan yang ditetapkan untuk jangka waktu (5) lima tahun yaitu dengan tahun 2021-2026

Perencanaan strategis Sekretariat Daerah Kota Pasuruan didasarkan pada rencana strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Kota Pasuruan tahun 2021-2026 dimana renstra Sekretariat Daerah Kota Pasuruan masih berpedoman pada dokumen rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Kota Pasuruan tahun 2021-2026 dan mengkomodir program dan kegiatan yang akan dijalankan bisa tercover kedalam dokumen renstra sekretariat tahun 2021-2026 dan dijabarkan kedalam rencana kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kota Pasuruan yang merupakan dokumen perencanaan SKPD tahunan. Didalam Renja Sekretariat Daerah Kota Pasuruan dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

4.2.1 VISI MISI WALIKOTA PASURUAN TAHUN 2016-2021

Visi adalah gambaran kondisi ideal yang diinginkan pada masa mendatang oleh Pemerintah dan Masyarakat Kota Pasuruan. Visi tersebut mengandung makna bahwa Kota Pasuruan dengan potensi, keragaman dan kompleksitas masalah yang tinggi, harus mampu dibangun untuk mewujudkan Masyarakat Kota Pasuruan yang sejahtera dengan memperkuat sektor industry, perdagangan dan jasa

Berpedoman pada arah pembangunan, sebagaimana termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Pasuruan Tahun 2015-2025, capaian kinerja periode sebelumnya (tahun 2021-2015), potensi Kota Pasuruan dan isu-isu strategis

serta tantangan lima tahun ke depan, maka visi pembangunan Kota Pasuruan yang ingin diwujudkan pada periode tahun 2021-2024 adalah

**“KOTA PASURUAN LEBIH SEJAHTERA, MANDIRI DAN BERDAYA
SAING DENGAN PERDAGANGAN, JASA DAN INDUSTRI”.**

1. Misi

A. Misi Walikota Pasuruan

Untuk mewujudkan visi tersebut, ditetapkan 7 (tujuh) misi pembangunan Kota Pasuruan, yaitu:

1. Meningkatkan partisipasi dan layanan kualitas pendidikan yang terjangkau
2. Meningkatkan cakupan dan kualitas layanan kesehatan masyarakat
3. Menciptakan kesempatan kerja dan kualitas iklim usaha yang kondusif
4. Meningkatkan pengembangan perdagangan jasa dan industri untuk pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat secara layak
5. Meningkatkan infrastruktur kota, sarana dan prasarana dasar serta pemanfaatan tata ruang yang berwawasan lingkungan
6. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan tata pemerintahan yang baik
7. Meningkatkan kualitas iman dan taqwa, berbudaya yang diliputi harmoni sosial dan kesalehan sosial

Berdasarkan visi dan misi Walikota Pasuruan Tahun 2016-2021 yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021 dan mengacu pada tugas dan fungsinya, maka Sekretariat Daerah Kota Pasuruan mendukung terlaksananya visi dan misi Walikota Pasuruan terutama misi ke enam, yaitu: **Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Pemerintahan yang baik.**

Pada tahun 2021 di Kota Pasuruan ada pergantian Kepala Daerah maka kita cantumkan 2 visi misi , visi misi yang atas menjelaskan kebijakan Kepala Daerah yang lama yag bawah menjelaskan visi misi Kepala Daerah yang baru

5 VISI MISI WALI KOTA PASURUAN TAHUN 2021 - 2026

Visi Kota Pasuruan tahun 2021-2026 adalah:

PASURUAN KOTA MADINAH

“ MAJU EKONOMINYA, INDAH KOTANYA, HARMONIS WARGANYA “

Kota Pasuruan Maju Ekonominya yang dimaksud adalah, cita-cita terbesar adalah Kota Pasuruan bergerak kedepan untuk menjadi kota yang baik, yang terdepan disegala aspeknya aspek ekonomi, aspek pelayanan publik, aspek pelayanan dasar, dan aspek lain-lainnya. Menjadikan Kota Pasuruan Maju juga merupakan komitmen atau upaya meningkatkan daya saing Kota Pasuruan dengan kabupaten / kota lain. Optimistis memajukan Kota Pasuruan bukannya tanpa alasan, secara historis Kota Pasuruan menjadi pusat kejayaanya Ketika kota tersebut sebagai ibu kota karesidenan. Kota Pasuruan menjadi pusat pemerintahan dan perdagangan.

Mewujudkan Kota Pasuruan Indah yang dimaksud berfokus terhadap menjadikan Kota Pasuruan Indah tata letak dan landscapenya. Menjadi salah satu wilayah yang berada di pesisir utara Provinsi Jawa Timur, merupakan modal utama menata Kota Pasuruan menjadi lebih estetik. Banyaknya kawasan heritage, menjadikan daya tambah pembangunan perkotaan Kota Pasuruan. Selain itu dengan kliblat pembangunan wilayah pesisir dengan konsep water front city akan menjadikan pembangunan dan penataan wilayah pesisir menjadi satu spot open space yang dapat dijadikan rujukan destinasi wisata baik masyarakat lokal maupun internasional.

Mewujudkan Kota Pasuruan Harmonis yang dimaksud adalah menjadikan Kota Pasuruan sebagai wilayah yang nyaman untuk ditinggali bagi seluruh lapisan masyarakat, masyarakat kaya maupun miskin, masyarakat dari berbagai suku dan etnis, masyarakat dengan pluralisme agama dan kebudayaan dapat dengan harmonis tinggal di Kota Pasuruan. Kunci utama dalam menciptakan Kota Pasuruan yang harmonis adalah dengan mengoptimalkan keberagaman tersebut sebagai modal sosial yang kuat dan merawatnya sehingga kehidupan di Kota Pasuruan tetap berlangsung aman, damai dan harmonis.

Selain uraian diatas terdapat fokus penting dari setiap poin visi sebagai guiden Pemerintah Kota Pasuruan untuk dapat mencapainya yang dimanifestasikan kedalam 9 Agenda Prioritas. Berikut merupakan detail uraian fokus dari Visi Kota Pasuruan Tahun 2021-2026:

1. Maju Ekonominya
 - a. Membangun Sentra UMKM dan Industri Olahan untuk Membuka Lapangan Kerja.
 - b. Menciptakan Daya Tarik Kunjungan Wisata berupa Wisata Religi, Budaya, Adat Istiadat, Heritage, dan Event Kreatif dengan Komunitas Lokal

- c. Membangun Sistem Perizinan yang Berorientasi Pada Kemudahan Berusaha dan Investasi
- d. Menciptakan Budaya Kerja Birokrasi yang Adaptif, Lincah, dan Bersih.

2. Indah Kotanya

- a. Penataan Kawasan Permukiman yang Terhubung dengan Aspek Perekonomian dan Layanan Dasar
- b. Menata Ruang Publik yang Hijau dan Nyaman yang Ramah Anak, Lansia, dan Difabel

3. Harmonis Warganya

- a. Menguatkan Modal Sosial yang Berkarakter dan Harmonisasi Antar Umat Beragama dan Etnis
- b. Memastikan Semua Lapisan Masyarakat Mudah dalam Mengakses Layanan Dasar Pendidikan dan Kesehatan serta perlindungan dari covid-19
- c. Mendekatkan Layanan Kepada Masyarakat dengan Digitalisasi Layanan

6 MISI

Misi adalah Rumusan Umum mengenai Upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi. Rumusan misi membantu menjelaskan gambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan Selain itu dalam perumusan misi harus memperhatikan faktor-faktor strategis baik eksternal berupa tantangan dan peluang maupun Internal yang berupa kekuatan dan kelemahan, sehingga misi yang disusun tidak hanya menerjemahkan visi semata. Mengacu kepada uraian visi diatas, Kota Pasuruan merumuskan 4 (empat) misi, dimana misi ini menggambarkan hal-hal yang harus terlaksana dalam mencapai visi tersebut. Dari keempat misi tersebut, Sekretariat Daerah Kota Pasuruan mendukung capaian misi ke- 1 dan 4, yaitu:

MISI 1 : MEMPERCEPAT PERTUMBUHAN DAN KETAHANAN EKONOMI BERBASIS POTENSI LOKAL UNTUK MEMBUKA LAPANGAN KERJA DAN PENGURANGAN KEMISKINAN

MISI 4 : TRANSFORMASI LAYANAN PUBLIK YANG MUDAH DAN CEPAT MELALUI DIGITALISASI MANAJEMEN DAN BIROKRASI YANG ADAPTIF

2.2 TUJUAN DAN SASARAN

Perumusan tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan yang strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja perangkat daerah.

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Pernyataan tujuan tersebut akan diterjemahkan kedalam sasaran-sasaran yang ingin dicapai.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja kinerja sesuai tugas dan fungsi SKPD atau kelompok sasaran yang dilayani serta profil pelayanan yang terkait dengan indikator kinerja.

Rencana Strategik Sekretariat Daerah Kota Pasuruan merupakan penjabaran dari RPJMD Kota Pasuruan sehingga perumusan tujuan dan sasaran Renstra Sekretariat Daerah tidak boleh bertentangan dengan dan harus mendukung tujuan dan sasaran dalam rangka pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana yang tertuang dalam RPJMD Kota Pasuruan Tahun 2021-2026.

Berdasarkan tugas pokok dan fungsinya, Sekretariat Daerah Kota Pasuruan mendukung visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Pasuruan yaitu :

1. Misi 1 : Mempercepat Pertumbuhan dan Ketahanan Ekonomi Berbasis Potensi Lokal untuk Membuka Lapangan Kerja dan Pengurangan Kemiskinan.
2. Misi 4 : Transformasi Layanan Publik yang Mudah dan Cepat Melalui Digitalisasi Manajemen dan Birokrasi yang Adaptif.

Perubahan tujuan, sasaran dan indikator kinerja sebelum dan setelah perubahan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

| TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR SASARAN | TARGET INDIKATOR SASARAN PADA TAHUN KE- | | | | | |
|--|---|---|---|-------|-------|-------|-------|------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Terwujudnya Kualitas Tata Kelola Administrasi yang mendukung Efektivitas dan Efisiensi Kebijakan Pemerintah Daerah | Meningkatnya Sistem Tata Kelola Pemerintahan yang baik dalam menjamin Pelayanan Prima | Nilai RB | 50 % | 62 % | 64 % | 66 % | 68 % | 70 % |
| | | Nilai SAKIP PD | BB | BB | A | A | A | A |
| | | Persentase temuan yang ditindaklanjuti | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100% |
| | | Persentase rata-rata ketercapaian pelaksanaan program dukungan sasaran PD | 80% | 80% | 82% | 85% | 85% | 90 % |
| | | SKM Pelayanan Sekretariat Daerah | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |

Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran Sebelum perubahan

| TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR SASARAN | DEFINISI | TARGET INDIKATOR SASARAN PADA TAHUN KE - | | | | | |
|--|---|---|---|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Terwujudnya Kualitas Tata Kelola Administrasi yang Mendukung Efektifitas dan Efesien Kebijakan Pemerintah Daerah | Meningkatnya Sisten Tata Kelola Pemerintah yang Baik Dalam Menjamin Pelayanan Prima | Nilai Sakip PD | Hasil Evaluasi SAKIP oleh Inspektorat Kota Pasuruan | BB | BB | BB | BB | BB | BB |
| | | Prosentase Rumusan Kebijakan yang Ditindaklanjuti | Jumlah Kebijakan Pusat yang Ditidaklanjuti | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | | SKM Pelayanan Sekretariat Daerah | Sebagai Pengukur Data dan Informasi Tentang Tingkat Kemampuan Masyarakat ,Dalam Memperoleh Kualitas Pelayanan Publik yang Dilakukan OPD Terhadap Masyarakat | Poin 80 | Poin 80 | Poin 80 | Poin 80 | Poin 80 | Poin 80 |

Tabel 2.2 Tujuan dan Sasaran Sesudah perubahan

2.3 INDIKATOR KINERJA UTAMA

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya peraturan menteri Negara pendayagunaan aparatur negara nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang pedoman umum penetapan indikator kinerja utama di lingkungan instansi pemerintah Kota Pasuruan, indikator kinerja utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah

Adapun indikator kinerja utama Sekretariat Daerah Kota Pasuruan sebagai berikut:

| Sasaran Strategis | Indikator Kinerja Utama | Metode / Formulasi Perhitungan |
|--|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| Meningkatannya kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah | Nilai Sakip PD | $\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$ |
| | Persentase temuan yang ditindaklanjuti | $\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$ |
| | Persentase rata-rata ketercapaian pelaksanaan program dukungan sasaran PD | $\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$ |
| | SKM Pelayanan Sekretariat Daerah | Nilai hasil survey kepuasan layanan kedinasan |

Tabel 2.3 Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah Sebelum Perubahan

| Sasaran Strategis | Indikator Kinerja Utama | Metode / Formulasi Perhitungan |
|---|---|--|
| 1 | 2 | 3 |
| Meningkatnya Sisten Tata Kelola Pemerintah yang Baik Dalam Menjamin Pelayanan Prima | Nilai Sakip PD | BB |
| Meningkatnya Tertib Adminitrasi Pemerintah | Prosentase Rumusan Kebijakan yang Ditindaklanjuti | $\frac{\text{Jumlah Persentasi Kebijakan Pusat yang Ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Realisasi Kebijakan Pusat yang Terbit}} \times 100\%$ |
| | SKM Pelayanan Sekretariat Daerah | $\frac{\text{Jumlah Poin SKM yang Ditindak Lanjuti}}{\text{Jumlah Trget Poin SKM Sekretariat Daerah}} \times 100\%$ |

Tabel 2.4 Indikator Kinerja Utama Sekretaris Daerah Perubahan Ke 2

2.4 PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian kinerja sebagai tekad dan janji dari perencana kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan pemerintah karena merupakan proses memberikan persepektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan perjanjian kinerja Sekretariat Daerah Kota Pasuruan Tahun 2022 mengacu pada Dokumen Renstra Sekretariat Daerah Kota Pasuruan Tahun 2021-2026, dokumen rencana kinerja tahunan (RKT) tahun 2022, Dokumen Rencana Kerja (Renja) tahun 2022, dan dokumen pelaksanaan anggaran perubahan (DPA-P) tahun 2022. Sekretariat Daerah Kota Pasuruan telah menyusun Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2022 dengan uraian sebagai berikut.

| NO | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target |
|----|--|--|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah | 1. Nilai Sakip PD | BB |
| | | 2. Persentase temuan yang ditindaklanjuti | 100 % |
| | | 3. Persentase rata-rata ketercapaian pelaksanaan program dukungan sasaran PD | 80 % |
| | | 4. SKM Pelayanan Sekretariat Daerah | 80 |

Tabel 2.5 Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah
Sebelum Perubahan 2022

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Definisi | Target |
|----|---|---|---|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Meningkatnya Sisten Tata Kelola Pemerintah yang Baik Dalam Menjamin Pelayanan Prima | Nilai Sakip PD | Hasil Evaluasi SAKIP oleh Inspektorat Kota Pasuruan | BB |
| 2 | Meningkatnya Tertib Administrasi Pemerintah | Prosentase Rumusan Kebijakan yang Ditindaklanjuti | Jumlah Kebijakan Pusat yang Ditidaklanjuti | 100% |
| | | SKM Pelayanan Sekretariat Daerah | Sebagai Pengukur Data dan Informasi Tentang Tingkat Kemampuan Masyarakat ,Dalam Memperoleh Kualitas Pelayanan Publik yang Dilakukan OPD Terhadap Masyarakat | 80 Poin |

Tabel 2.6 Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah
Sesudah Perubahan 2022

2.5 PERENCANAAN ANGGARAN

Untuk perencanaan tahun 2022, sekretariat daerah didukung oleh 3 program yang berkaitan langsung dengan pencapaian kinerja dan didukung oleh anggaran belanja langsung sebelum perubahan sebesar **Rp. 40.020.420.695,-** . Setelah Perubahan **Rp. 39.461.250.663** dengan rincian sebagai berikut :

Perencanaan Anggaran Sekretariat Daerah Perubahan Tahun 2022

| Kode Rekening | Uraian | Anggaran Sebelum Perubahan | Anggaran Setelah Perubahan | (%) |
|---------------|---|----------------------------|----------------------------|---------|
| 4 | PENDAPATAN DAERAH | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 0,00 |
| 4.1 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 0,00 |
| 5.1 | BELANJA TIDAK LANGSUNG | 16.863.834.970 | 15.629.340.544 | 93.91 % |
| 5.2 | BELANJA LANGSUNG | 22.597.415.693 | 24.391.080.151 | 80.44 % |
| 5.2.01 | Perencanaan , Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 22.797.270 | 36.517.600 | 65.73 % |
| 5.2.01.01 | - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 10.784.970 | 14.505.300 | |

| Kode Rekening | Uraian | Anggaran Sebelum Perubahan | Anggaran Setelah Perubahan | (%) |
|---------------|---|----------------------------|----------------------------|----------------|
| | | | | 27.76 % |
| 5.2.01.06 | - Koordinasi dan Penyusutan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 7.974.300 | 7.974.300 | 51.25 % |
| 5.2.01.07 | - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 4.038.000 | 14.038.000 | 74.96 % |
| 5.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 67.117.500 | 14.310.728.692 | 23.38 % |
| 5.2.02.01 | - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | - | - | |
| 5.2.02.07 | - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | 59.444.100 | 317.290.950 | 16.80 % |
| 5.2.02.08 | - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | 7.673.400 | 7.673.400 | 37.89 % |
| 5.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | 21.899.900 | 43.739.900 | 61.31 % |
| 5.2.03.05 | - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | 21.899.900 | 43.739.900 | 61.31 % |
| 5.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 558.016.470 | 250.450.570 | 69.43 % |
| 5.2.05.02 | - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | 221.632.800 | 217.672.200 | 78.77 % |
| 5.2.05.03 | - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | 27.798.100 | 9.392.700 | 62.60 % |
| 5.2.05.10 | - Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan | 308.585.570 | 23.385.670 | 69.21 % |
| 5.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 2.835.457.454 | 4.093.047.954 | 81.00 % |
| 5.2.06.01 | - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor | 86.877.914 | 86.877.914 | 99,61 % |
| 5.2.06.02 | - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 754.678.900 | 1.270.183.900 | 74.46 % |
| 5.2.06.03 | - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 169.649.160 | 160.234.660 | 88.51 % |
| 5.2.06.05 | - Penyediaan Barang dan Cetak dan Pengadaan | 187.823.800 | 292.823.800 | 92.34 % |
| 5.2.06.06 | - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 97.203.000 | 97.203.000 | 99.32 % |

| Kode Rekening | Uraian | Anggaran Sebelum Perubahan | Anggaran Setelah Perubahan | (%) |
|---------------|---|----------------------------|----------------------------|----------------|
| 5.2.06.07 | - Penyediaan Bahan/ Material | 67.000.000 | 67.000.000 | 94.31 % |
| 5.2.06.08 | - Fasilitas Kunjungan Tamu | 668.022.480 | 724.522.480 | 94.12 % |
| 5.2.06.09 | - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 789.059.700 | 1.379.059.700 | 65.12 % |
| 5.2.06.10 | - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | 15.142.500 | 15.142.500 | 0,00 % |
| 5.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 0,00 | 38.318.400 | 0,00 % |
| 5.2.07.02 | - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 38.318.400 | 38.318.400 | 0,00 % |
| 5.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 3.320.694.382 | 3.517.984.322 | 88.89 % |
| 5.2.08.01 | - Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 8.000.000 | 8.000.000 | 26.79 % |
| 5.2.08.02 | - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 824.711.270 | 1.066.178.470 | 79.39 % |
| 5.2.08.04 | - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 2.487.983.112 | 2.443.805.852 | 92.04 % |
| 5.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 3.087.845.337 | 3.480.708.172 | 85.28 % |
| 5.2.09.02 | - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 1.347.064.775 | 1.891.433.036 | 94.51 % |
| 5.2.09.05 | - Pemeliharaan Mebel | 25.416.080 | 92.196.080 | 98.61 % |
| 5.2.09.06 | - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 274.864.972 | 254.754.246 | 62.32 % |
| 5.2.09.08 | - Pemeliharaan Aset Tak Berwujud | 64.023.640 | 54.023.640 | 85.92 % |
| 5.2.09.09 | - Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 419.748.410 | 288.348.410 | 82.26 % |

| Kode Rekening | Uraian | Anggaran Sebelum Perubahan | Anggaran Setelah Perubahan | (%) |
|---------------|---|----------------------------|----------------------------|----------------|
| 5.2.09.10 | - Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 135.615.410 | 64.280.410 | 45.34 % |
| 5.2.09.11 | - Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 821.112.050 | 835.673.350 | 85,31 % |
| 5.2.15 | Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | 197.997.130 | 123.964.430 | 33.93 % |
| 5.2.15.02 | - Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | 133.510.530 | 84.510.530 | 42.18 % |
| 5.2.15.03 | - Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | 64.486.600 | 39.453.900 | 15.71 % |
| 5.2.16 | Fasilitasi Kerumahtanggan Sekretariat Daerah | 2.276.246.388 | 3.712.916.466 | 79.75 % |
| 5.2.16.01 | - Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah | 2.276.246.388 | 2.358.393.338 | 78.91 % |
| 5.2.16.02 | - Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah | 1.183.613.178 | 1.124.708.178 | 80.65 % |
| 5.2.16.03 | - Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah | 327.580.900 | 229.814.950 | 82.73 % |
| 5.2.17 | Penataan Organisasi | 570.996.340 | 1.088.110.440 | 94.82 % |
| 5.2.17.01 | - Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan | 245.245.200 | 204.025.200 | 97.16 % |
| 5.2.17.02 | - Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana | 132.015.540 | 623.711.840 | 92.27 % |
| 5.2.17.03 | - Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi | 193.735.600 | 260.373.400 | 94.66 % |
| 5.2.18 | Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan | 1.163.995.400 | 1.323.995.400 | 99.06 % |
| 5.2.18.01 | - Fasilitasi Keprotokolan | 844.371.000 | 844.371.000 | 99.29 % |
| 5.2.18.02 | - Fasilitasi Komunikasi Pimpinan | 27.298.700 | 27.298.700 | 98.07 % |

| Kode Rekening | Uraian | Anggaran Sebelum Perubahan | Anggaran Setelah Perubahan | (%) |
|---------------|--|----------------------------|----------------------------|----------------|
| 5.2.18.03 | - Pendokumentasian Tugas Pimpinan | 292.325.700 | 452.325.700 | 98.40 % |
| 5.2.19 | Administrasi Tata Pemerintahan | 547.536.970 | 517.841.560 | 93.79 % |
| 5.2.19.01 | - Penataan Administrasi Pemerintahan | 465.275.150 | 435.579.740 | 93.79 % |
| 5.2.19.2 | - Pengelola Administrasi Kewilayahan | 82.261.820 | 82.261.820 | 0% |
| 5.2.20 | Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat | 3.123.824.704 | 2.911.462.007 | 64.12 % |
| 5.2.20.01 | - Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual | 3.101.909.824 | 2.889.547.127 | 63.32 % |
| 5.2.20.02 | - Pelaksanaan Kebijakan , Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial | 10.281.640 | 10.281.640 | 93.44 % |
| 5.2.20.03 | - Pelaksanaan Kebijakan , Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat | 11.633.240 | 11.633.240 | 91.84 % |
| 5.2.21 | Fasilitasi dan Koordinasi Hukum | 1.620.998.600 | 1.532.899.600 | 59.55 % |
| 5.2.21.01 | - Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah | 726.744.900 | 581.029.900 | 89.04 % |
| 5.2.21.02 | - Fasilitasi Bantuan Hukum | 616.370.100 | 673.986.100 | 26.36 % |
| 5.2.21.03 | - Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum | 277.883.600 | 277.883.600 | 87.13 % |
| 5.2.22 | Fasilitasi Kerjasama Daerah | 162.186.060 | 141.881.270 | 99.36 % |
| 5.2.22.01 | - Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri | 162.186.060 | 141.881.270 | 99.36 % |
| 5.2.23 | Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian | 336.402.100 | 328.892.500 | 67.61 % |
| 5.2.23.01 | - Koordinasi, Sinkronisasi , Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD | 93.799.100 | 107.519.100 | 98.05 % |
| 5.2.23.02 | - Pengendalian dan Distribusi Perekonomian | 126.347.300 | 26.348.600 | 65.66 % |

| Kode Rekening | Uraian | Anggaran Sebelum Perubahan | Anggaran Setelah Perubahan | (%) |
|---------------|---|----------------------------|----------------------------|----------------|
| 5.2.23.03 | - Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil | 20.497.400 | 38.616.700 | 95.63 % |
| 5.2.23.04 | - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD | 31.917.300 | 54.707.100 | |
| 5.2.23.05 | - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD | 63.841.000 | 101.701.000 | |
| 5.2.24 | Pelaksanaan Administrasi Pembangunan | 617.285.350 | 550.066.850 | 90.50 % |
| 5.2.24.01 | - Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan | 370.936.250 | 330.727.750 | 97.41 % |
| 5.2.24.02 | - Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan | 126.749.500 | 106.499.500 | 70.50 % |
| 5.2.24.03 | - Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembnaganan | 119.599.600 | 112.839.600 | 93.45 % |
| 5.2.25 | Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa | 296.499.060 | 595.131.060 | 95.28 % |
| 5.2.25.01 | - Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa | 134.181.060 | 164.181.060 | 97.86 % |
| 5.2.25.02 | - Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik | 38.645.200 | 100.477.200 | 0.00 % |
| 5.2.25.03 | - Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa | 123.672.800 | 330.472.800 | 93.98 % |
| 5.2.26 | Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam | 2.201.068.000 | 62.526.300 | 94.87 % |
| 5.2.26.01 | - Koordinasi , Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian , Kehutanan , Kelautan , dan Perikanan | 203.519.600 | 44.392.200 | 95.32 % |
| 5.2.26.02 | - Koordinasi , Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup | - | - | |
| 5.2.26.03 | - Koordinasi , Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air | 16.587.200 | 18.134.100 | 86.57 % |

Tabel 2.7 Tabel Perencana Anggaran 2022

BAB 3

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 CAPAIAN TARGET SASARAN STRATEGIS

Capaian kinerja Sekretariat Daerah Kota Pasuruan Tahun 2022 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran. Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator sasaran tersebut didapat diilustrasikan dalam table dibawah ini :

| NO | SasaranStrategis | IndikatorKinerja | Target | Realisasi | % |
|----|--|---|------------------|-----------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah | Nilai Sakip PD | BB (>70-80) | 82,87 | 103,58% |
| | | Persentase temuan yang ditindaklanjuti | 100 % | 100% | 100% |
| | | Persentase rata-rata ketercapaian pelaksanaan program dukungan sasaran PD | 80 % | 100% | 125% |
| | | SKM Pelayanan Sekretariat Daerah | 80 | 80 | 100 |

Tabel 3.1 Capaian Kinerja Sekretariat Daerah Sebelum Perubahan Tahun 2022

| NO | SasaranStrategis | IndikatorKinerja | Target | Realisasi | % |
|----|---|---|----------|-------------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Meningkatnya Sisten Tata Kelola Pemerintah yang Baik Dalam Menjamin Pelayanan Prima | Nilai Sakip PD | BB | BB | 100% |
| 2 | Meningkatnya Tertib Adminitrasi Pemerintah | Prosentase Rumusan Kebijakan yang Ditindaklanjuti | 100 | 91,41% | 91,41% |
| | | SKM Pelayanan Sekretariat Daerah | Point 80 | 99,28 Point | 124,10 |

Tabel 3.2 Capaian Kinerja Sekretariat Daerah Sesudah Perubahan Tahun 2022

Secara umum terdapat keberhasilan pencapaian sasaran strategis berikut indikator indikator kinerjanya, namun demikian juga terdapat beberapa sasaran strategis yang tidak berhasil diwujudkan pada tahun 2022 ini.

3.2 EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Dalam pencapaian kinerja tahun 2022 Sekretariat Daerah Kota Pasuruan melakukan pengukuran capaian kinerja sasaran strategis dengan membandingkan capaian masing-masing indikator kinerja antara target dan realisasi serta capaian tahun sebelumnya dilakukan evaluasi dan analisa pencapaian kinerja atas sasaran

Adapun analisa capaian kinerja masing-masing sasaran, adalah sebagai berikut :

| Sasaran Strategis | IndikatorKinerja | Target | Realisasi | % |
|--|------------------|------------------|-----------|------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah | Nilai Sakip PD | BB (>70-80) | BB | 100% |

Tabel 3.3 Sasaran ke 1 "Meningkatannya kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah"

Tabel diatas menunjukkan rata-rata capaian kinerja sasaran sebesar 100% (dalam kategori sangat memuaskan). Pencapaian ini merupakan akumulasi penilaian seluruh komponen manajemen kinerja yang di evaluasi dengan rincian sebagai berikut

| Komponen | Bobot | Nilai Hasil Evaluasi |
|--|------------|----------------------|
| A. Perencanaan Kinerja | 30 | 24,00 |
| B. Pengukuran Kinerja | 30 | 21,90 |
| C. Pelaporan Kinerja | 15 | 10,05 |
| D. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal | 25 | 17,50 |
| Jumlah | 100 | 73,46 |

Uraian hasil evaluasi atas masing masing komponen manajemen kinerja tersebut adalah :

A. PERENCANAAN KINERJA

Evaluasi atas perencanaan kinerja mencakup penilaian atas dokumen Rencana Strategi (Renstra) Tahun 2021. Penilaian terhadap masing masing dokumen tersebut meliputi Keberadaan, Kualitas dan Pemanfaatan.

Hasil evaluasi atas komponen perencanaan kinerja menunjukkan nilai sebesar **24,00** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **30,00** Simpulan hasil evaluasi atas komponen perencanaan kinerja tersebut diperoleh dari agregasi penilaian atas sub-kon:ponen sebagai berikut:

1. Dokumen Perencana Kinerja (Renstra) yaitu keberadaan Dokumen Perencanaan K-inerja Tahun 2021 Sekretariat Daerah Kota Pasuruan;

Dokumen perencanaan kinerja telah tersedia.

Hasil evaluasi atas pemenuhan atau keberadaan dokumen perencanaan kinerja menunjukkan nilai sebesar **4,80** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **6,00**

2. Penilaian Kualitas

Dokumen perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (cascading) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (crosscutting).

Hasil evaluasi atas kualitas dokumen perencanaan kinerja menunjukkan nilai sebesar **7,20** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **9,00**

3. Pemanfaatan.

Sekretariat Daerah Kota Pasuruan sudah sepenuhnya menggunakan dokumen perencanaan kinerja sebagai acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan tahunan serta penyusunan dokumen rencana kerja anggaran dan perencanaan kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan.

Hasil evaluasi atas kualitas dokumen perencanaan kinerja menunjukkan nilai sebesar **12,00** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **15,00**

B. PENGUKURAN KINERJA

Hasil evaluasi atas dokumen pengukuran kinerja Tahun 2021 menunjukkan nilai sebesar **21,90** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **30,00**. Berdasarkan hasil penilaian atas pengukuran kinerja telah dilakukan, pengukuran kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan kinerja secara efektif dan efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan dan pengukuran kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian reward dan punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien adalah sebagai berikut :

1. Pengukuran Kinerja telah dilakukan;

Evaluasi atas pengukuran kinerja mencakup penilaian yang meliputi perumusan dan penetapan Indikator Kinerja Utama, Indikator Kinerja Sasaran. .

Hasil evaluasi atas komponen pengukuran kinerja menunjukkan nilai sebesar **4,20** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **3,60**

2. Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara efektif dan efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan;

Sekretariat Daerah Kota Pasuruan sudah menyusun Indikator Kinerja Utama sebagai ukuran kinerja secara formal. Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tanggal 31 Mei 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja di Lingkungan Instansi Pemerintah pasal

3, menyatakan setiap instansi pemerintah wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama di lingkungannya masing-masing; dan Pasal 4 butir (3) Gubernur/ Kepala Daerah/ Walikota wajib menetapkan indikator kinerja untuk pemerintah provinsi/ Prov/ Kab/ Kota dan Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) serta Unit Kerja Mandiri di bawahnya, sedangkan pasal 3 dinyatakan bahwa setiap instansi pemerintah wajib menetapkan indikator kinerja utama di lingkungan, masing-masing.

Hasil evaluasi atas sub-komponen pemenuhan pengukuran kinerja Tahun 2021 menunjukkan nilai sebesar **6,30** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **9,00**

3. Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian reward dan punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien.

Sekretariat Daerah Kota Pasuruan sudah sepenuhnya menggunakan pengukuran kinerja sebagai acuan dalam pemberian reward dan punishment yang diberikan kepada pegawainya dalam bentuk tunjangan kinerja yaitu Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) dalam aplikasi **SIJAJA**

Hasil evaluasi atas pengukuran Kinerja menunjukkan nilai sebesar **12,00** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **15,00**

C. PELAPORAN KINERJA

Evaluasi atas pelaporan kinerja mencakup penilaian atas dokumen laporan yang menggambarkan kinerja, dokumen laporan kinerja telah memenuhi standar menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, informasi keberhasilan/ kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/ penyempurnaannya dan pelaporan kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/ kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya.

Hasil evaluasi atas komponen pelaporan kinerja menunjukkan nilai sebesar **10,05** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **15,00**

Simpulan hasil evaluasi atas komponen pelaporan kinerja tersebut diperoleh dari agregasi penilaian atas sub-komponen sebagai berikut:

1. Dokumen laporan yang menggambarkan kinerja;

Sekretariat Daerah Kota Pasuruan telah menyusun dan menyampaikan dokumen LAKIP Tahun 2021 tepat waktu.

Hasil evaluasi atas sub-komponen pemenuhan pelaporan kinerja menunjukkan nilai sebesar **2,40** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **3.00**

2. Dokumen laporan kinerja telah memenuhi standar menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/ penyempurnaannya;

Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Kota Pasuruan telah menyajikan informasi pencapaian sasaran yang berorientasi outcome, serta telah menyajikan informasi keuangan yang terkait dengan pencapaian kinerja, menyajikan informasi mengenai pencapaian IKU, kemajuan pencapaian target jangka menengah, perbandingan data kinerja yang memadai antara realisasi tahun ini dengan realisasi tahun sebelumnya.

Hasil evaluasi atas penyajian informasi kinerja menunjukkan nilai sebesar **3,15** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **4,50**

3. Pelaporan kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/ kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya.

Informasi kinerja yang disajikan dalam laporan kinerja Tahun 2021 tingkat organisasi perangkat daerah sudah digunakan dalam perbaikan perencanaan, peningkatan kinerja, serta digunakan untuk menilai dan memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan.

Hasil evaluasi atas penyajian informasi kinerja menunjukkan nilai sebesar **4,50** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **7,50**

D. EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL

Evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan sumber daya yang memadai dan Implementasi SAKIP telah meningkat karena

evaluasi akuntabilitas kinerja internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi kinerja.

Hasil evaluasi atas evaluasi kinerja menunjukkan nilai sebesar **17,50** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **25,00**

Simpulan hasil evaluasi atas komponen pelaporan kinerja tersebut diperoleh dari agregasi penilaian atas sub-komponen sebagai berikut:

1. **Evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah dilaksanakan;** Sekretariat Daerah Kota Pasuruan telah melaksanakan monitoring dan evaluasi atas kemajuan pencapaian kinerja beserta hambatannya atas programnya, sehingga hasil evaluasi dapat disampaikan dan dikomunikasikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

Hasil evaluasi atas evaluasi kinerja menunjukkan nilai sebesar **3,50** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **5,00**

2. **Evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan sumber daya yang memadai;**

Evaluasi program sudah dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang berkompetensi, pelaksanaan evaluasi program disupervisi dengan baik melalui pembahasan-pembahasan yang regular dan bertahap, evaluasi program dilaksanakan dalam rangka menilai keberhasilan program, evaluasi program memberikan rekomendasi - rekomendasi perbaikan perencanaan kinerja yang dapat dilaksanakan.

Hasil evaluasi atas evaluasi kinerja internal menunjukkan nilai sebesar **5,25** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **7,50**

3. **Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi akuntabilitas kinerja internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi Kinerja.**

Sekretariat Daerah Kota Pasuruan melakukan evaluasi internal atas akuntabilitas kinerja sehingga ada pemanfaatan dalam penyusunan perencanaan kinerja di tahun

berikutnya dan upaya-upaya perbaikan untuk mengatasi hambatan dalam pencapaian sasaran.

Hasil evaluasi atas penerapan evaluasi kinerja internal menunjukkan nilai sebesar **8,75** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **12,50**

Untuk mendukung keberhasilan kinerja indikator dari sasaran ini, Sekretariat Daerah Kota Pasuruan melaksanakan program dan beberapa kegiatan. Diantaranya adalah :

Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota diukur dengan *satu* indikator yaitu :

1. BAGIAN UMUM

Persentase Kebutuhan Penunjang Pemerintah yang Terfasilitasi di ukur dengan indikator Persentase Kebutuhan Penunjang Pemerintahan yang Terfasilitasi. Pada tahun 2022 ditargetkan sebesar 90% dan terealisasi 91% sehingga capaiannya sebesar 101%. Faktor pendorong Program Capaian ini dengan benar – benar menghitung dan merencanakan sesuai kebutuhan pemeliharaan dan fasilitas di lingkungan gedung Sekretariat Daerah, Rumah Dinas Kepala Daerah, Rumah Dinas Wakil Kepala Daerah, Rumah Dinas Sekretaris Daerah.

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota didukung oleh 10 (Sepuluh) Kegiatan yakni :

- Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang diukur dengan indikator Persentase Dokumen Perencanaan yang Tersusun Tepat Waktu dengan target sebesar 100% dan terealisasi sebesar 78% sehingga capaiannya sebesar 78%. Faktor penghambat pada Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah untuk Kegiatan Coaching Clinic Probis RB karena sudah di ambil alih kegiatan tersebut di bagian organisasi dan Kembali lagi untuk Kegiatan Karnaval Mobil Hias.
- Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah diukur dengan indikator persentase Laporan Barang Milik Daerah yang Tersusun Tepat Waktu, pada tahun 2022 ditargetkan sebesar 100% dengan realisasi sebesar 100% sehingga capaiannya sebesar 100%. Faktor pendorong capaian ini dengan menghitung dan merencanakan jumlah pembayaran ASN yang terfasilitasi dengan baik, melaporkan keuangan yang tersusun dengan tepat waktu

- Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah diukur dengan indikator persentase Laporan Barang Milik Daerah yang Tersusun Tepat Waktu, pada tahun 2022 ditargetkan sebesar 100% dengan realisasi sebesar 100% sehingga capaiannya sebesar 100% Faktor Pendorong ini berdasarkan data Perangkat Daerah di Kota Pasuruan yang dikarenakan adanya Simda barang memudahkan Pengelolaan Administrasi BMD.
- Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah diukur dengan indikator Persentase SDM Aparatur yang Meningkatkan Kompetensinya, pada tahun 2022 di targetkan sebesar 90% dengan realisasi 73% sehingga capaiannya sebesar 81%. Faktor pendorong kegiatan ini dikarenakan kebutuhan pakaian dinas beserta atribut sudah di hitung dan di rencanakan sesuai kebutuhan yang tersusun tepat waktu.
- Administrasi Umum Perangkat Daerah di ukur dengan indikator Persentase Terpenuhinya Layanan Administrasi Perkantoran. Pada tahun 2022 di targetkan 90% dan realisasi 94% sehingga capaiannya sebesar 104% dengan faktor pendukung adalah dengan menghitung secara baik sesuai kebutuhan sebelum menentukan target kinerja.
- Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah di ukur dengan indikator Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah yang Tepat Waktu. Pada tahun 2022 di targetkan 90% dan Realisasi 100% sehingga capaiannya 111%. Faktor pendukung ketercapaian ini Melakukan Pergeseran antar rekening yang dimana untuk pembelian sepeda motor diganti untuk memodifikasi ke Kendaraan Panwal.
- Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah di ukur dengan indikator Persentase Terpenuhinya Jasa Penunjang Layanan Perkantoran. Pada Tahun 2022 di targetkan 90 % dan realisasi 91% sehingga capaiannya 101%. Faktor pendukung ketercapaian ini pembayaran honor pegawai kontrak, cs, kebutuhan ATK dan pembayaran Penyedia Jasa komunikasi , sumber daya air dan listrik sudah sesuai dan tepat waktu.
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah di ukur dengan indikator Persentase Barang Milik Daerah yang Dipelihara di targetkan 90% dan realisasinya 69% sehingga capaiannya 76%. Faktor penghambat dikarenakan sub kegiatan pemeliharaan mebel ada pergeseran dan penyediaan kebutuhan Jasa pemeliharaan sudah menyesuaikan dengan kebutuhan sehingga mempengaruhi hasil kinerja kegiatan tersebut.

- Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di ukur dengan indikator Persentase Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Terpenuhi di targetkan 90% dan realisasi 88% sehingga capaiannya 97%. faktor penghambatnya di dalam kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terdapat Penyediaan Gaji dan Tunjangan KDH dan WKDH sudah terpenuhi dalam 12 bulan namun ada yg kurang terpenuhi dalam sub kegiatan Pelaksana Medical Check up di karenakan menyesuaikan kesehatan dan permintaan KDH dan WKDH.
- Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah di ukur dengan indikator Persentase Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, dan Sekretaris Daerah yang Terpenuhi di targetkan 90% realisasinya 100% sehingga capaiannya 111%. Faktor pendorong ketercapaian ini di karenakan fasilitasi kebutuhan kerumah tanggaan yang di targetkan 12 bulan sudah tercapai sesuai kebutuhan yang kita rencanakan.

2. BAGIAN ORGANISASI

Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota. Pelaksanaan Program penunjang urusan pemerintah kab/kota diukur dengan indikator yaitu :

Persentase capaian area Reformasi Birokrasi. Pada tahun 2022 ditargetkan sebesar 64 dan terealisasi 64,09 sehingga capaiannya sebesar 100%. Capaian ini berdasarkan dari hasil penilaian Reformasi Birokrasi yang dilaksanakn oleh Kementerian PANRB Tahun 2022. Ketercapaian target indikator tersebut didukung oleh seluruh Perangkat Daerah ikut berperan aktif dalam pelaksanaan penilaian serta dengan kerja sama Bappelitbangda, Inspektorat dan Bagian Organisasi dengan melaksanakan pendampingan pada Perangkat Daerah sesuai dengan arahan Kementerian PANRB.

Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah didukung oleh 1 (satu) Kegiatan yakni :

Kegiatan Penataan Organisasi yang diukur dengan indikator Persentase capaian kinerja sub kegiatan (di monev indikator kegiatannya Persentase Perangkat Daerah yang sesuai dengan perundang undangan dengan target 100%, realisasi 100% sehingga capaiannya 100%) sebesar 100% dan terealisasi sebesar 100% sehingga capaiannya sebesar 100%.

Capaian ini berdasarkan jumlah tahapan pelaksanaan seluruh sub kegiatan yang ada telah terlaksana.

Sasaran ke 2 “Meningkatnya Tertib Adminitrasi Pemerintah”

| Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | % |
|---|---|----------|-------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Meningkatnya Tertib Administrasi Pemerintahan | Prosentase Rumusan Kebijakan yang Ditindaklanjuti | 100% | 91,41% | 91,41% |
| | SKM Pelayanan Sekretariat Daerah | Point 80 | 99,28 Point | 124,10 Point |

Tabel 3.4 Sasaran ke 2 “Meningkatnya Tertib Adminitrasi Pemerintah”

1. BAGIAN PEREKONOMIAN

Uraian Capaian Program dan Kegiatan Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan. Program Perekonomian dan Pembangunan Pelaksanaan Program Perekonomian dan Pembangunan diukur dengan satu indikator yaitu :

Persentase Kebijakan Bidang Perekonomian dan SDA yang ditindaklanjuti Perangkat Daerah. Pada tahun 2022 ditargetkan sebesar 85% dan terealisasi 100% sehingga capaiannya sebesar 117,65%. Capaian ini berdasarkan Jumlah kebijakan bidang Perekonomian dan SDA yang telah ditindaklanjuti Perangkat Daerah sejumlah 3 kebijakan dari total Jumlah rancangan kebijakan bidang Perekonomian dan SDA yang disusun sejumlah 3 kebijakan. Ketercapaian target indikator didukung oleh adanya operasi pasar murah dan rapat koordinasi dalam pengendalian inflasi, monitoring pupuk dan pestisida, rapat Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi.

Program Perekonomian dan Pembangunan didukung oleh 2 (Dua) Kegiatan yakni :

Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian yang diukur dengan indikator Persentase PD yang melaksanakan kebijakan Perekonomian dengan target sebesar 85% dan terealisasi sebesar 100% sehingga capaiannya sebesar 117,65%. Capaian ini berdasarkan Jumlah kebijakan Perekonomian yang telah disampaikan Kepada PD

Pelaksana Kebijakan yang tercapai sejumlah 2 kebijakan dari total rancangan kebijakan Perekonomian yang disusun sejumlah 2 kebijakan. Kebijakan tersebut adalah perumusan kebijakan Tim Pengendalian Inflasi daerah (TPID) dan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD). Ketercapaian indikator ini didukung oleh adanya regulasi Peraturan presiden Nomor 82 Tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Daerah dan keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 500.05-8135 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Daerah.

Kegiatan Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam diukur dengan indikator Persentase Kebijakan Bidang Perekonomian dan SDA yang ditindaklanjuti PD, pada tahun 2022 ditargetkan sebesar 85% dengan realisasi sebesar 100% sehingga capaiannya sebesar 117,65%. Capaian ini berdasarkan Jumlah kebijakan SDA yang telah disampaikan Kepada PD Pelaksana Kebijakan yang tercapai sejumlah 1 kebijakan dari total rancangan kebijakan Perekonomian yang disusun sejumlah 1 kebijakan. Kebijakan tersebut adalah perumusan kebijakan surat edaran Walikota Pasuruan nomor terkait penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai dan Kompor Listrik Induksi di Kota Pasuruan. Ketercapaian target indikator didukung adanya regulasi Peraturan Presiden nomor 55 Tahun 2019 tentang percepatan program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) untuk transportasi Jalan dan arahan Bapak Presiden Republik Indonesia kepada Direksi dan Komisaris PT. PLN (Persero) tanggal 20 November 2021 dan Surat Edaran Peraturan Gubernur Jawa Timur terkait Himbuan penggunaan kendaraan bermotor Listrik Berbasis Baterai dan Kompor Listrik Induksi di Jawa Timur Nomor : 671/851/124.3/2022 pada tanggal 9 Maret 2022 .

2. BAGIAN PEMBANGUNAN

Uraian Capaian Program dan Kegiatan Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang. Pelaksanaan Program Perekonomian dan Pembangunan diukur dengan indikator yaitu Prosentase kebijakan bidang pembangunan yang ditindaklanjuti Perangkat Daerah. Pada tahun 2022 ditargetkan sebesar 100% dan terealisasi 100% atau tercapai 100%, sehingga capaiannya sebesar 100%. Capaian ini berdasarkan pada Jumlah Perangkat Daerah yang menindaklanjuti sebanyak 41 Perangkat Daerah dari 41 Perangkat Daerah. Produk kebijakan di bidang pembangunan, berupa Standar Harga Satuan Bahan Bangunan Tahun Anggaran 2023 dan Standar Harga Satuan (Standar Honorarium dan Belanja) Tahun Anggaran 2023, digunakan Perangkat Daerah dalam penyusunan

perencanaan program kegiatan tahun anggaran 2023. Ketercapaian target indikator ini didukung dengan adanya sosialisasi dan pendampingan yang dilaksanakan oleh Bagian Administrasi Pembangunan terkait penerapan pedoman Standar Harga Satuan Bahan Bangunan Tahun Anggaran 2023 dan Standar Harga Satuan (Standar Honorarium dan Belanja) Tahun Anggaran 2023 oleh Perangkat Daerah dalam penyusunan perencanaan program kegiatan tahun anggaran 2023.

Program Perekonomian dan Pembangunan didukung oleh 1 (satu) kegiatan yaitu Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan diukur dengan indikator Jumlah Pedoman/Juknis/Juklak Program Pembangunan yang disusun dengan target sebesar 2 dokumen dan terealisasi sebesar 2 dokumen atau tercapai 100%. Capaian ini berdasarkan pada jumlah Pedoman yang disusun sejumlah 2 dokumen yaitu Standar Harga Satuan Bahan Bangunan Tahun Anggaran 2023, Standar Harga Satuan (Standar Honorarium dan Belanja) Tahun Anggaran 2023. Ketercapaian target indikator ini didukung oleh koordinasi yang baik antara Bagian Administrasi Pembangunan dengan Perangkat Daerah terkait dalam penyusunan pedoman Standar Harga Satuan (Standar Honorarium dan Belanja) Tahun Anggaran 2023 dan koordinasi yang baik antara Bagian Administrasi Pembangunan dengan pihak ketiga dalam penyusunan pedoman Standar Harga Satuan Bahan Bangunan Kerja Tahun Anggaran 2023.

Kegiatan yang mendukung program Perekonomian dan Pembangunan telah sesuai dengan target kinerja program yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Indikator Program Perekonomian dan Pembangunan berupa Prosentase kebijakan bidang pembangunan yang ditindaklanjuti Perangkat Daerah dengan target sebesar 100% didukung oleh kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan dimana dalam kegiatan tersebut terdapat pelaksanaan Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan, Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan dan Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan.

3. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa

Bagian Pengadaan Barang dan Jasa dengan Pelaksanaan Program Perekonomian dan Pembangunan diukur dengan 2 (dua) indikator yaitu :

➤ IKM Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa

Pada tahun 2022 indikator IKM Pelayanan pengadaan barang dan jasa ditargetkan sebesar 90 poin dan terealisasi sebesar 87 poin sesuai dengan Kuesioner yang disebarakan kepada

masyarakat di kota pasuruan sehingga capaian terhadap target tersebut sebesar 97%. Faktor penghambat tidak tercapainya indikator tersebut dikarenakan kendala kurang puasnya masyarakat dalam proses pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dan kurangnya akses informasi terkait sistem pengadaan secara elektronik.

2. Persentase PD yang tertib administrasi pengadaan barang dan jasa.

Pada tahun 2022 indicator persentase PD yang tertib administrasi pengadaan barang dan jasa ditargetkan sebesar 90% dan terealisasi 100% sehingga capaian terhadap target indicator sebesar 111% . Faktor pendorong tercapainya indikator persentase PD yang tertib administrasi adalah meningkatnya ketertiban PD dilingkup Kota Pasuruan dalam penyusunan RUP maupun dalam pelaksanaan kegiatan yang sesuai dengan aturan yang berlaku, serta meningkatnya koordinasi dalam proses pengadaan barang dan jasa.

Program Perekonomian dan Pembangunan didukung oleh 1 (satu) kegiatan yaitu Kegiatan Pengelolaan pengadaan barang dan jasa dengan indikator persentase PD tertib administrasi dengan realisasi sebesar 100% dari target sebesar 90%, sehingga capaiannya sebesar 111%. Ketercapaian target indikator ini didukung oleh koordinasi yang baik antara Bagian Pengadaan Barang dan jasa dengan Perangkat Daerah terkait dalam proses pengadaan barang dan jasa di pemerintah kota pasuruan dan koordinasi yang baik antara Bagian Pengadaan Barang dan Jasa dengan perangkat daerah terkait.

4. Bagian Kesejahteraan Rakyat

Pelaksanaan Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat diukur dengan indikator

- Prosentase kebijakan bidang kesra yang ditindaklanjuti Perangkat Daerah. Pada Tahun 2022 ditargetkan sebesar 80% dan terealisasi 75%, sehingga capaiannya 93,75%. Capaian ini berdasarkan jumlah kebijakan Bidang kesra yang ditindaklanjuti Perangkat Daerah dan target 4 kebijakan terealisasi 3 kebijakan. ketidaktercapaian indikator target ini dikarenakan kurangnya koordinasi dengan OPD terkait sehingga ada OPD terkait yang membuat kebijakan sendiri tanpa melalui Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan.

Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat didukung oleh 1 (satu) kegiatan yaitu

- Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat diukur dengan Indikator Jumlah Kebijakan Bidang Kesra yang ditindak lanjuti Perangkat Daerah dengan target sebesar 4 kebijakan terealisasi sebesar 3 (tiga) Kebijakan capaian ini berdasarkan yaitu:
- Keputusan WaliKota Pasuruan Nomor: 188/173/423.011/2022, Kelompok kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu Kota Pasuruan
- Keputusan Wali Kota Pasuruan Nomor: 188/305/423.011/2022, Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah/ Madrasah Kota Pasuruan
- Keputusan Wali Kota Pasuruan Nomor: 188/297/423.011/2022, Penunjukan Atlit Kegiatan Pekan Olahraga Pelajar Daerah Jawa Timur ke XIII 2022.

5. Bagian Hukum

Pelaksanaan Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat diukur dengan satu indikator yaitu SKM Pelayanan Hukum. Pada tahun 2022 ditargetkan sebesar 80% dan terealisasi 80% sehingga capaiannya sebesar 100%. Capaian ini berdasarkan data survey tentang kepuasan terhadap pelayanan yang telah dilakukan oleh bagian hukum kepada 173 responden dari berbagai Perangkat Daerah di Kota Pasuruan. Pada survey tersebut diperoleh bahwa sebanyak 20,9% menyatakan pelayanan yang diberikan sangat baik (nilai A) dan 62,8% menyatakan baik (nilai B). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pelayanan yang diberikan pada Bagian Hukum adalah baik (B)/80. Ketercapaian target indikator ini oleh kerjasama yang baik antar Pegawai Bagian Hukum dalam melayani permohonan produk hukum daerah dan peningkatan penyediaan pelayanan produk hukum melalui website.

Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat didukung oleh satu Kegiatan yakni Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum yang diukur dengan indikator Persentase Ketercapaian Kinerja Sub Kegiatan yang terlayani di bidang Hukum dengan target sebesar 90% dan terealisasi sebesar 96,65% sehingga capaiannya sebesar 111,53%. Hal ini berdasarkan pada 12 indikator yaitu 8 indikator sesuai dengan target 100% dan terealisasi sebesar 100% sehingga capaiannya sebesar 100%. Capaian ini berdasarkan kerjasama dan komunikasi yang baik antar Perangkat Daerah di Pemerintah Kota Pasuruan. Sedangkan 4 indikator tidak sesuai target antara lain Peraturan Daerah masih menunggu jadwal fasilitasi dari Biro Hukum Provinsi Jawa Timur, Pembuatan Naskah Akademik Peraturan Daerah didukung dikarenakan belum adanya peraturan pelaksanaannya, terkait Bantuan Hukum untuk masyarakat karena tidak adanya

permohonan proposal pengajuan bantuan hukum yang diajukan, sedangkan himpunan produk hukum daerah dicetak sesuai dengan kebutuhan.

6. Bagian Administrasi Pemerintahan

Bagian Administrasi Pemerintahan dengan Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat diukur dengan dua indikator yaitu :

1. Persentase kebijakan bidang pemerintahan yang ditindaklanjuti PD. Pada tahun 2022 ditargetkan sebesar 80% dan terealisasi 77,81% sehingga capaiannya sebesar 97,26%. Capaian ini berdasarkan data jumlah indikator urusan pada kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan, terealisasi 71 indikator dari 73 indikator. Indikator urusan terbagi antara lain pelaksanaan Forkopimda sejumlah 12 terealisasi 10, Koordinasi Pimpinan Eksekutif dan Pimpinan Legislatif sejumlah 2 terealisasi 2, Penyusunan LPPD Kota Pasuruan TA. 2021 sejumlah 36 terealisasi 36, Penyusunan Standar Pelayanan Maksimal sejumlah 6 terealisasi 6, Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Harjaprov ke 77 di Kota Pasuruan sejumlah 1 terealisasi 1, Koordinasi Kinerja Kecamatan sejumlah 2 terealisasi 2, Pembinaan Evaluasi Kelurahan sejumlah 8 terealisasi 8, Pembinaan Pengembangan Kapasitas Aparatur Kelurahan sejumlah 1 terealisasi 1 dan Koordinasi Profil Kelurahan sejumlah 5 terealisasi 5.

Ketidak ketercapaian ini disebabkan karena menyesuaikan agenda pimpinan daerah dan jajaran samping.

2. Indikator yang kedua yaitu Persentase fasilitasi kerjasama yang ditindaklanjuti PD. Pada tahun 2022 ditargetkan sebesar 80% dan terealisasi 80 % atau tercapai 100%. Capaian ini berdasarkan data jumlah indikator urusan pada kegiatan Fasilitasi Kerjasama Daerah terealisasi 32 indikator dari 32 indikator. Indikator urusan terbagi antara lain kerjasama yang dijajaki sejumlah 30 terealisasi 30, Pertemuan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) sejumlah 2 terealisasi 2.

Ketercapaian target indikator ini didukung oleh tingkat koordinasi yang baik dengan Perangkat Daerah.

Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat didukung oleh 2 (dua) Kegiatan yakni :

1. Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan yang diukur dengan indikator Persentase rata-rata ketercapaian pelaksanaan program dukungan sasaran PD dengan target sebesar 80% dan terealisasi sebesar 77,81% sehingga capaiannya sebesar 97,26%. Capaian ini berdasarkan jumlah pelaksanaan Forkopimda yang terlaksana sejumlah 10 kegiatan dari total 12 kegiatan, Jumlah Koordinasi Pimpinan Eksekutif dan Pimpinan Legeslatif yang terlaksana sejumlah 2 kegiatan dari total 2 kegiatan, Jumlah urusan dalam LPPD Kota Pasuruan TA. 2021 terlaksana sejumlah 36 urusan dari total 36 urusan, Jumlah Urusan dalam Standar Pelayanan Maksimal terlaksana sejumlah 6 urusan dari total 6 urusan, Kegiatan Fasilitas Harjaprov ke 77 di Kota Pasuruan terlaksana sejumlah 1 kegiatan dari total 1 kegiatan, Jumlah Rapat Koordinasi Kinerja Kecamatan terlaksana sejumlah 2 kali rapat dari total 2 kali rapat, Jumlah Rapat Pembinaan Evaluasi Kelurahan terlaksana sejumlah 8 kali rapat dari total 8 kali rapat, Jumlah Rapat Pembinaan Pengembangan Kapasitas Aparatur Kelurahan terlaksana sejumlah 1 kali rapat dari total 1 kali rapat dan Jumlah Rapat Koordinasi Profil Kelurahan terlaksana 5 kali rapat dari total 5 kali rapat. Ketercapaian indikator ini didukung oleh adanya regulasi Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Profil Desa dan Kelurahan, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan.

Ketidak ketercapaian target indikator ini dikarenakan menyesuaikan agenda pimpinan daerah dan jajaran samping.

2. Kegiatan Fasilitas Kerjasama Daerah diukur dengan indikator Persentase rata-rata ketercapaian pelaksanaan program dukungan sasaran PD dengan target sebesar 80% dan terealisasi sebesar 80% sehingga capaiannya sebesar 100%. Capaian ini berdasarkan data program, kegiatan dan sub kegiatan beserta target indikatornya telah terisi pada RKPD dan Rencana Kerja Perangkat Daerah. Ketercapaian target indikator didukung Jumlah peluang kerjasama yang dijajaki terlaksana sejumlah 30 kali rapat peluang kerjasama dari total 30 kali rapat peluang kerjasama, Jumlah pertemuan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) terlaksana sejumlah 2 kali

pertemuan dari total 2 kali pertemuan. Ketercapaian target indikator ini disebabkan tingkat koordinasi yang baik dengan Perangkat Daerah.

7. Bagian Protokol

Bagian Protokol dengan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota diukur dengan *satu* indikator yaitu Persentase Layanan Kebutuhan Pimpinan yang Terasilitasi. Pada tahun 2022 ditargetkan sebesar 90% dan terealisasi 90% sehingga capaiannya sebesar 100%. Capaian ini berdasarkan data jumlah layanan kebutuhan pimpinan yang terfasilitasi tahun 2022 sejumlah 102 permintaan dari total jumlah layanan kebutuhan pimpinan sejumlah 107 permintaan. Bentuk permintaan fasilitasi layanan dari perangkat daerah penyelenggara suatu acara yang mengundang Kepala Daerah berupa surat permintaan yang ditindaklanjuti Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan dengan mengirimkan personil untuk memfasilitasi kehadiran Wali Kota, Wakil Wali Kota dan Forkopimda Kota Pasuruan. Ketercapaian target indikator didukung oleh setiap pegawai memiliki motivasi kerja yang tinggi dan kerjasama yang baik.

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota didukung oleh satu Kegiatan yakni Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan yang diukur dengan indikator Persentase Perangkat Daerah yang terlayani di bidang keprotokolan dan komunikasi pimpinan dengan target sebesar 90% dan terealisasi sebesar 90% sehingga capaiannya sebesar 100%. Capaian ini berdasarkan jumlah perangkat daerah yang terlayani di bidang keprotokolan dan komunikasi pimpinan sejumlah 38 perangkat daerah dari total perangkat daerah di Pemerintah Kota Pasuruan sejumlah 40 perangkat daerah. Hal ini didukung oleh komunikasi yang terjalin baik dengan Perangkat Daerah terkait.

3.3 PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH

Uraian perbandingan realisasi capaian kinerja tahun sebelumnya sampai dengan realisasi tahun 2022 Sekretariat Daerah bisa dilihat dari table dibawah ini:

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja Utama | Target | Realisasi |
|----|--|---|------------------|-----------|
| | | | | 2021 |
| 1 | Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah | Nilai Sakip PD | BB (<70-80) | 82,87% |
| | | Persentase temuan yang ditindaklanjuti | 100 % | 100% |
| | | Persentase rata-rata ketercapaian pelaksanaan program dukungan sasaran PD | 80 % | 81,66 |
| | | SKM Pelayanan Sekretariat Daerah | 80 | 89 |

Tabel 3.5 Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja Sebelum Perubahan

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja Utama | Target | Realisasi |
|----|---|---|----------|-------------|
| | | | 2022 | |
| 1 | Meningkatnya Sisten Tata Kelola Pemerintah yang Baik Dalam Menjamin Pelayanan Prima | Nilai Sakip PD | BB | - |
| 2 | Meningkatnya Tertib Adminitrasi Pemerintah | Prosentase Rumusan Kebijakan yang Ditindaklanjuti | 100% | 91,41% |
| | | SKM Pelayanan Sekretariat Daerah | Point 80 | 99,28 Point |

Tabel 3.6 Perbandingan Realisasi Kinerja Perubahan

3.4 AKUNTABILITAS KEUANGAN

Berdasarkan alokasi anggaran Sekretariat Daerah Kota Pasuruan Tahun 2022, pagu dan realisasi anggaran perprogram dapat dirinci sebagai berikut :

| Kode Rekening | Uraian | Anggaran | Realisasi | Capaian |
|---------------|---|-----------------------|-----------------------|------------|
| 5.2.01 | Perencanaan , Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 36.517.600 | 18.880.250 | 52% |
| 5.2.01.01 | - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 14.505.300 | 13.011.300 | 90% |
| 5.2.01.06 | - Koordinasi dan Penyusutan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 7.974.300 | 4.782.900 | 60% |
| 5.2.01.07 | - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 14.038.000 | 1.086.050 | 8% |
| 5.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 14.310.728.692 | 14.106.811.577 | 99% |
| 5.2.02.01 | - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | - | - | - |
| 5.2.02.07 | - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | 317.290.950 | 301.537.644 | 95% |
| 5.2.02.08 | - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | 7.673.400 | 7.418.050 | 97% |
| 5.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | 43.739.900 | 22.742.500 | 52% |
| 5.2.03.05 | - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | 43.739.900 | 22.742.500 | 52% |
| 5.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 250.450.570 | 233.113.000 | 93% |
| 5.2.05.02 | - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | 217.672.200 | 214.788.500 | 99% |
| 5.2.05.03 | - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | 9.392.700 | 7.424.500 | 79% |
| 5.2.05.10 | - Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan | 23.385.670 | 10.900.000 | 47% |
| 5.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 4.093.047.954 | 3.875.064.602 | 95% |
| 5.2.06.01 | - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor | 86.877.914 | 55.649.750 | 64% |
| 5.2.06.02 | - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 1.270.183.900 | 1.149.790.720 | 91% |
| 5.2.06.03 | - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 160.234.660 | 142.810.975 | 89% |
| 5.2.06.05 | - Penyediaan Barang dan Cetak dan Pengadaan | 292.823.800 | 291.126.800 | 99% |

| Kode Rekening | Uraian | Anggaran | Realisasi | Capaian |
|---------------|---|----------------------|----------------------|------------|
| 5.2.06.06 | - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 97.203.000 | 97.170.600 | 99% |
| 5.2.06.07 | - Penyediaan Bahan/ Material | 67.000.000 | 64.735.000 | 97% |
| 5.2.06.08 | - Fasilitasi Kunjungan Tamu | 724.522.480 | 690.232.557 | 95% |
| 5.2.06.09 | - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 1.379.059.700 | 1.372.966.700 | 99% |
| 5.2.06.10 | - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | 15.142.500 | 10.581.500 | 70% |
| 5.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 38.318.400 | 34.200.000 | 89% |
| 5.2.07.02 | - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 38.318.400 | 34.200.000 | 89% |
| 5.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 3.517.984.322 | 3.060.239.136 | 87% |
| 5.2.08.01 | - Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 8.000.000 | 5.021.100 | 63% |
| 5.2.08.02 | - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 1.066.178.470 | 759.263.156 | 71% |
| 5.2.08.04 | - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 2.443.805.852 | 2.295.954.980 | 94% |
| 5.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 3.480.708.172 | 3.151.187.022 | 91% |
| 5.2.09.02 | - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 1.891.433.036 | 1.854.534.993 | 98% |
| 5.2.09.05 | - Pemeliharaan Mebel | 92.196.080 | - | - |
| 5.2.09.06 | - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 254.754.246 | 214.161.958 | 84% |
| 5.2.09.08 | - Pemeliharaan Aset Tak Berwujud | 54.023.640 | 44.107.550 | 82% |
| 5.2.09.09 | - Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 288.348.410 | 189.525.244 | 66% |
| 5.2.09.10 | - Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 64.280.410 | 52.368.022 | 81% |
| 5.2.09.11 | - Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 835.673.350 | 796.489.255 | 95% |
| 5.2.15 | Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | 123.964.430 | 50.643.200 | 41% |
| 5.2.15.02 | - Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | 84.510.530 | 41.243.200 | 49% |
| 5.2.15.03 | - Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | 39.453.900 | 9.400.000 | 24% |

| Kode Rekening | Uraian | Anggaran | Realisasi | Capaian |
|---------------|--|----------------------|----------------------|------------|
| 5.2.16 | Fasilitasi Kerumahtanggan Sekretariat Daerah | 3.712.916.466 | 3.160.112.785 | 85% |
| 5.2.16.01 | - Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah | 2.358.393.338 | 1.906.243.526 | 81% |
| 5.2.16.02 | - Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah | 1.124.708.178 | 1.074.511.287 | 96% |
| 5.2.16.03 | - Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah | 229.814.950 | 179.357.972 | 78% |
| 5.2.17 | Penataan Organisasi | 1.088.110.440 | 1.047.709.450 | 96% |
| 5.2.17.01 | - Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan | 204.025.200 | 201.160.550 | 98% |
| 5.2.17.02 | - Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana | 623.711.840 | 589.182.500 | 94% |
| 5.2.17.03 | - Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi | 260.373.400 | 257.366.400 | 98% |
| 5.2.18 | Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan | 1.323.995.400 | 1.289.142.735 | 97% |
| 5.2.18.01 | - Fasilitasi Keprotokolan | 844.371.000 | 832.685.385 | 99% |
| 5.2.18.02 | - Fasilitasi Komunikasi Pimpinan | 27.298.700 | 24.911.500 | 91% |
| 5.2.18.03 | - Pendokumentasian Tugas Pimpinan | 452.325.700 | 431.545.850 | 95% |
| 5.2.19 | Administrasi Tata Pemerintahan | 517.841.560 | 430.607.940 | 83% |
| 5.2.19.01 | - Penataan Administrasi Pemerintahan | 435.579.740 | 348.914.885 | 80% |
| 5.2.19.2 | - Pengelola Administrasi Kewilayahan | 82.261.820 | 81.693.055 | 99% |
| 5.2.20 | Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat | 2.911.462.007 | 1.775.765.780 | 53% |
| 5.2.20.01 | - Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual | 2.889.547.127 | 1.416.964.580 | 53% |
| 5.2.20.02 | - Pelaksanaan Kebijakan , Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial | 10.281.640 | 4.130.000 | 40% |
| 5.2.20.03 | - Pelaksanaan Kebijakan , Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat | 11.633.240 | 7.221.200 | 62% |
| 5.2.21 | Fasilitasi dan Koordinasi Hukum | 1.532.899.600 | 1.278.003.930 | 83% |
| 5.2.21.01 | - Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah | 581.029.900 | 441.768.780 | 76% |
| 5.2.21.02 | - Fasilitasi Bantuan Hukum | 673.986.100 | 573.920.500 | 85% |
| 5.2.21.03 | - Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum | 277.883.600 | 262.314.650 | 94% |

| Kode Rekening | Uraian | Anggaran | Realisasi | Capaian |
|---------------|---|--------------------|--------------------|-------------|
| 5.2.22 | Fasilitasi Kerjasama Daerah | 141.881.270 | 141.450.505 | 100% |
| 5.2.22.01 | - Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri | 141.881.270 | 141.450.505 | 100% |
| 5.2.23 | Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian | 328.892.500 | 224.752.000 | 68% |
| 5.2.23.01 | - Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD | 107.519.100 | 68.326.500 | 63% |
| 5.2.23.02 | - Pengendalian dan Distribusi Perekonomian | 26.348.600 | 24.442.400 | 25% |
| 5.2.23.03 | - Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil | 38.616.700 | 36.241.300 | 94% |
| 5.2.23.04 | - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD | 54.707.100 | 3.411.000 | 6% |
| 5.2.23.05 | - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD | 101.701.000 | 91.127.000 | 91% |
| 5.2.24 | Pelaksanaan Administrasi Pembangunan | 550.066.850 | 447.339.615 | 81% |
| 5.2.24.01 | - Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan | 330.727.750 | 317.716.360 | 17% |
| 5.2.24.02 | - Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan | 106.499.500 | 28.204.200 | 4% |
| 5.2.24.03 | - Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan | 112.839.600 | 101.419.055 | 90% |
| 5.2.25 | Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa | 595.131.060 | 562.716.263 | 94% |
| 5.2.25.01 | - Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa | 164.181.060 | 156.707.013 | 95% |
| 5.2.25.02 | - Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik | 100.477.200 | 95.658.400 | 95% |
| 5.2.25.03 | - Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa | 330.472.800 | 310.350.850 | 94% |
| 5.2.26 | Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam | 62.526.300 | 29.356.500 | 97% |
| 5.2.26.01 | - Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan | 44.392.200 | 19.858.000 | 45% |
| 5.2.26.02 | - Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup | - | - | - |
| 5.2.26.03 | - Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air | 18.134.100 | 9.498.500 | 52% |

Tabel 3.7 Realisasi Anggaran

3.5 ANALIS PROGRAM / KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN ATAUPUN KEGAGALAN PENCAPAIAN PENYATAAN KINERJA

Untuk mendukung keberhasilan kinerja indikator dari sasaran ini, Sekretariat Daerah Kota Pasuruan melaksanakan program dan beberapa kegiatan. Diantaranya adalah :

Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota diukur dengan *satu* indikator yaitu :

BAGIAN UMUM

Persentase Kebutuhan Penunjang Pemerintah yang Terfasilitasi di ukur dengan indikator Persentase Kebutuhan Penunjang Pemerintahan yang Terfasilitasi. Pada tahun 2022 ditargetkan sebesar 90% dan terealisasi 91% sehingga capaiannya sebesar 101%. Faktor pendorong Program Capaian ini dengan benar – benar menghitung dan merencanakan sesuai kebutuhan pemeliharaan dan fasilitas di lingkungan gedung Sekretariat Daerah, Rumah Dinas Kepala Daerah, Rumah Dinas Wakil Kepala Daerah, Rumah Dinas Sekretaris Daerah.

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota didukung oleh 10 (Sepuluh) Kegiatan yakni :

- Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang diukur dengan indikator Persentase Dokumen Perencanaan yang Tersusun Tepat Waktu dengan target sebesar 100% dan terealisasi sebesar 78% sehingga capaiannya sebesar 78%. Faktor penghambat pada Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah untuk Kegiatan Coaching Clinic Probis RB karena sudah di ambil alih kegiatan tersebut di bagian organisasi dan Kembali lagi untuk Kegiatan Karnaval Mobil Hias.
- Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah diukur dengan indikator persentase Laporan Barang Milik Daerah yang Tersusun Tepat Waktu, pada tahun 2022 ditargetkan sebesar 100% dengan realisasi sebesar 100% sehingga capaiannya sebesar 100%. Faktor pendorong capaian ini dengan menghitung dan merencanakan jumlah pembayaran ASN yang terfasilitasi dengan baik, melaporkan keuangan yang tersusun dengan tepat waktu

- Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah diukur dengan indikator persentase Laporan Barang Milik Daerah yang Tersusun Tepat Waktu, pada tahun 2022 ditargetkan sebesar 100% dengan realisasi sebesar 100% sehingga capaiannya sebesar 100%. Faktor Pendorong ini berdasarkan data Perangkat Daerah di Kota Pasuruan yang dikarenakan adanya Simda barang memudahkan Pengelolaan Administrasi BMD.
- Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah diukur dengan indikator Persentase SDM Aparatur yang Meningkatkan Kompetensinya, pada tahun 2022 di targetkan sebesar 90% dengan realisasi 73% sehingga capaiannya sebesar 81%. Faktor pendorong kegiatan ini dikarenakan kebutuhan pakaian dinas beserta atribut sudah di hitung dan di rencanakan sesuai kebutuhan yang tersusun tepat waktu.
- Administrasi Umum Perangkat Daerah di ukur dengan indikator Persentase Terpenuhinya Layanan Administrasi Perkantoran. Pada tahun 2022 di targetkan 90% dan realisasi 94% sehingga capaiannya sebesar 104% dengan faktor pendukung adalah dengan menghitung secara baik sesuai kebutuhan sebelum menentukan target kinerja.
- Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah di ukur dengan indikator Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah yang Tepat Waktu. Pada tahun 2022 di targetkan 90% dan Realisasi 100% sehingga capaiannya 111%. Faktor pendukung ketercapaian ini Melakukan Pergeseran antar rekening yang dimana untuk pembelian sepeda motor diganti untuk memodifikasi ke Kendaraan Panwal.
- Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah di ukur dengan indikator Persentase Terpenuhinya Jasa Penunjang Layanan Perkantoran. Pada Tahun 2022 di targetkan 90 % dan realisasi 91% sehingga capaiannya 101%. Faktor pendukung ketercapaian ini pembayaran honor pegawai kontrak, cs, kebutuhan ATK dan pembayaran Penyedia Jasa komunikasi , sumber daya air dan listrik sudah sesuai dan tepat waktu.
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah di ukur dengan indikator Persentase Barang Milik Daerah yang Dipelihara di targetkan 90% dan realisasinya 69% sehingga capaiannya 76%. Faktor penghambat dikarenakan sub kegiatan pemeliharaan mebel ada pergeseran dan penyediaan kebutuhan Jasa pemeliharaan sudah menyesuaikan dengan kebutuhan sehingga mempengaruhi hasil kinerja kegiatan tersebut.

- Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di ukur dengan indikator Persentase Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Terpenuhi di targetkan 90% dan realisasi 88% sehingga capaiannya 97%. faktor penghambatnya di dalam kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terdapat Penyediaan Gaji dan Tunjangan KDH dan WKDH sudah terpenuhi dalam 12 bulan namun ada yg kurang terpenuhi dalam sub kegiatan Pelaksana Medical Check up di karenakan menyesuaikan kesehatan dan permintaan KDH dan WKDH.
- Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah di ukur dengan indikator Persentase Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, dan Sekretaris Daerah yang Terpenuhi di targetkan 90% realisasinya 100% sehingga capaiannya 111%. Faktor pendorong ketercapaian ini di karenakan fasilitasi kebutuhan kerumah tanggaan yang di targetkan 12 bulan sudah tercapai sesuai kebutuhan yang kita rencanakan.

BAGIAN ORGANISASI

Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota. Pelaksanaan Program penunjang urusan pemerintah kab/kota diukur dengan indikator yaitu :

Persentase capaian area Reformasi Birokrasi. Pada tahun 2022 ditargetkan sebesar 64 dan terealisasi 64,09 sehingga capaiannya sebesar 100%. Capaian ini berdasarkan dari hasil penilaian Reformasi Birokrasi yang dilaksanakn oleh Kementerian PANRB Tahun 2022. Ketercapaian target indikator tersebut didukung oleh seluruh Perangkat Daerah ikut berperan aktif dalam pelaksanaan penilaian serta dengan kerja sama Bappelitbangda, Inspektorat dan Bagian Organisasi dengan melaksanakan pendampingan pada Perangkat Daerah sesuai dengan arahan Kementerian PANRB.

Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah didukung oleh 1 (satu) Kegiatan yakni :

Kegiatan Penataan Organisasi yang diukur dengan indikator Persentase capaian kinerja sub kegiatan (di monev indikator kegiatannya Persentase Perangkat Daerah yang sesuai dengan perundang undangan dengan target 100%, realisasi 100% sehingga capaiannya 100%) sebesar 100% dan terealisasi sebesar 100% sehingga capaiannya

sebesar 100%. Capaian ini berdasarkan jumlah tahapan pelaksanaan seluruh sub kegiatan yang ada telah terlaksana.

BAGIAN PEREKONOMIAN

Uraian Capaian Program dan Kegiatan Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan. Program Perekonomian dan Pembangunan Pelaksanaan Program Perekonomian dan Pembangunan diukur dengan satu indikator yaitu :

Persentase Kebijakan Bidang Perekonomian dan SDA yang ditindaklanjuti Perangkat Daerah. Pada tahun 2022 ditargetkan sebesar 85% dan terealisasi 100% sehingga capaiannya sebesar 117,65%. Capaian ini berdasarkan Jumlah kebijakan bidang Perekonomian dan SDA yang telah ditindaklanjuti Perangkat Daerah sejumlah 3 kebijakan dari total Jumlah rancangan kebijakan bidang Perekonomian dan SDA yang disusun sejumlah 3 kebijakan. Ketercapaian target indikator didukung oleh adanya operasi pasar murah dan rapat koordinasi dalam pengendalian inflasi, monitoring pupuk dan pestisida, rapat Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi.

Program Perekonomian dan Pembangunan didukung oleh 2 (Dua) Kegiatan yakni : Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian yang diukur dengan indikator Persentase PD yang melaksanakan kebijakan Perekonomian dengan target sebesar 85% dan terealisasi sebesar 100% sehingga capaiannya sebesar 117,65%. Capaian ini berdasarkan Jumlah kebijakan Perekonomian yang telah disampaikan Kepada PD Pelaksana Kebijakan yang tercapai sejumlah 2 kebijakan dari total rancangan kebijakan Perekonomian yang disusun sejumlah 2 kebijakan. Kebijakan tersebut adalah perumusan kebijakan Tim Pengendalian Inflasi daerah (TPID) dan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD). Ketercapaian indikator ini didukung oleh adanya regulasi Peraturan presiden Nomor 82 Tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Daerah dan keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 500.05-8135 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Daerah.

Kegiatan Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam diukur dengan indikator Persentase Kebijakan Bidang Perekonomian dan SDA yang ditindaklanjuti PD, pada tahun 2022 ditargetkan sebesar 85% dengan realisasi sebesar 100% sehingga capaiannya sebesar 117,65%. Capaian ini berdasarkan Jumlah kebijakan SDA yang telah disampaikan Kepada PD Pelaksana Kebijakan yang tercapai sejumlah 1 kebijakan dari total rancangan kebijakan Perekonomian yang disusun sejumlah 1 kebijakan. Kebijakan tersebut adalah perumusan kebijakan surat edaran Walikota Pasuruan nomor terkait

penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai dan Kompor Listrik Induksi di Kota Pasuruan. Ketercapaian target indikator didukung adanya regulasi Peraturan Presiden nomor 55 Tahun 2019 tentang percepatan program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) untuk transportasi Jalan dan arahan Bapak Presiden Republik Indonesia kepada Direksi dan Komisaris PT. PLN (Persero) tanggal 20 November 2021 dan Surat Edaran Peraturan Gubernur Jawa Timur terkait Himbauan penggunaan kendaraan bermotor Listrik Berbasis Baterai dan Kompor Listrik Induksi di Jawa Timur Nomor : 671/851/124.3/2022 pada tanggal 9 Maret 2022 .

BAGIAN PEMBANGUNAN

Uraian Capaian Program dan Kegiatan Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang. Pelaksanaan Program Perekonomian dan Pembangunan diukur dengan indikator yaitu Prosentase kebijakan bidang pembangunan yang ditindaklanjuti Perangkat Daerah. Pada tahun 2022 ditargetkan sebesar 100% dan terealisasi 100% atau tercapai 100%, sehingga capaiannya sebesar 100%. Capaian ini berdasarkan pada Jumlah Perangkat Daerah yang menindaklanjuti sebanyak 41 Perangkat Daerah dari 41 Perangkat Daerah. Produk kebijakan di bidang pembangunan, berupa Standar Harga Satuan Bahan Bangunan Tahun Anggaran 2023 dan Standar Harga Satuan (Standar Honorarium dan Belanja) Tahun Anggaran 2023, digunakan Perangkat Daerah dalam penyusunan perencanaan program kegiatan tahun anggaran 2023. Ketercapaian target indikator ini didukung dengan adanya sosialisasi dan pendampingan yang dilaksanakan oleh Bagian Administrasi Pembangunan terkait penerapan pedoman Standar Harga Satuan Bahan Bangunan Tahun Anggaran 2023 dan Standar Harga Satuan (Standar Honorarium dan Belanja) Tahun Anggaran 2023 oleh Perangkat Daerah dalam penyusunan perencanaan program kegiatan tahun anggaran 2023.

Program Perekonomian dan Pembangunan didukung oleh 1 (satu) kegiatan yaitu Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan diukur dengan indikator Jumlah Pedoman/Juknis/Juklak Program Pembangunan yang disusun dengan target sebesar 2 dokumen dan terealisasi sebesar 2 dokumen atau tercapai 100%. Capaian ini berdasarkan pada jumlah Pedoman yang disusun sejumlah 2 dokumen yaitu Standar Harga Satuan Bahan Bangunan Tahun Anggaran 2023, Standar Harga Satuan (Standar Honorarium dan Belanja) Tahun Anggaran 2023. Ketercapaian target indikator ini didukung oleh koordinasi yang baik antara Bagian Administrasi Pembangunan dengan

Perangkat Daerah terkait dalam penyusunan pedoman Standar Harga Satuan (Standar Honorarium dan Belanja) Tahun Anggaran 2023 dan koordinasi yang baik antara Bagian Administrasi Pembangunan dengan pihak ketiga dalam penyusunan pedoman Standar Harga Satuan Bahan Bangunan Kerja Tahun Anggaran 2023.

Kegiatan yang mendukung program Perekonomian dan Pembangunan telah sesuai dengan target kinerja program yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Indikator Program Perekonomian dan Pembangunan berupa Prosentase kebijakan bidang pembangunan yang ditindaklanjuti Perangkat Daerah dengan target sebesar 100% didukung oleh kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan dimana dalam kegiatan tersebut terdapat pelaksanaan Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan, Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan dan Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan.

Bagian Pengadaan Barang dan Jasa

Bagian Pengadaan Barang dan Jasa dengan Pelaksanaan Program Perekonomian dan Pembangunan diukur dengan 2 (dua) indikator yaitu :

➤ **IKM Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa**

Pada tahun 2022 indikator IKM Pelayanan pengadaan barang dan jasa ditargetkan sebesar 90 poin dan terealisasi sebesar 87 poin sesuai dengan Kuesioner yang disebarkan kepada masyarakat di kota pasuruan sehingga capaian terhadap target tersebut sebesar 97%. Faktor penghambat tidak tercapainya indikator tersebut dikarenakan kendala kurang puasnya masyarakat dalam proses pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dan kurangnya akses informasi terkait sistem pengadaan secara elektronik.

➤ **Persentase PD yang tertib administrasi pengadaan barang dan jasa.**

Pada tahun 2022 indicator persentase PD yang tertib administrasi pengadaan barang dan jasa ditargetkan sebesar 90% dan terealisasi 100% sehingga capaian terhadap target indicator sebesar 111% . Faktor pendorong tercapainya indikator persentase PD yang tertib administrasi adalah meningkatnya ketertiban PD dilingkup Kota Pasuruan dalam penyusunan RUP maupun dalam pelaksanaan kegiatan yang sesuai dengan aturan yang berlaku, serta meningkatnya koordinasi dalam proses pengadaan barang dan jasa.

Program Perekonomian dan Pembangunan didukung oleh 1 (satu) kegiatan yaitu Kegiatan Pengelolaan pengadaan barang dan jasa dengan indikator persentase PD tertib administrasi dengan realisasi sebesar 100% dari target sebesar 90%, sehingga

capaiannya sebesar 111%. Ketercapaian target indikator ini didukung oleh koordinasi yang baik antara Bagian Pengadaan Barang dan jasa dengan Perangkat Daerah terkait dalam proses pengadaan barang dan jasa di pemerintah kota pasuruan dan koordinasi yang baik antara Bagian Pengadaan Barang dan Jasa dengan perangkat daerah terkait.

Bagian Kesejahteraan Rakyat

Pelaksanaan Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat diukur dengan indikator

- Prosentase kebijakan bidang kesra yang ditindaklanjuti Perangkat Daerah. Pada Tahun 2022 ditargetkan sebesar 80% dan terealisasi 75%, sehingga capaiannya 93,75%. Capaian ini berdasarkan jumlah kebijakan Bidang kesra yang ditindaklanjuti Perangkat Daerah dan target 4 kebijakan terealisasi 3 kebijakan. ketidaktercapaian indikator target ini dikarenakan kurangnya koordinasi dengan OPD terkait sehingga ada OPD terkait yang membuat kebijakan sendiri tanpa melalui Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan.

Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat didukung oleh 1 (satu) kegiatan yaitu

- Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat diukur dengan Indikator Jumlah Kebijakan Bidang Kesra yang ditindak lanjut Perangkat Daerah dengan target sebesar 4 kebijakan terealisasi sebesar 3 (tiga) Kebijakan capaian ini berdasarkan yaitu:
- Keputusan WaliKota Pasuruan Nomor: 188/173/423.011/2022, Kelompok kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu Kota Pasuruan
- Keputusan Wali Kota Pasuruan Nomor: 188/305/423.011/2022, Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah/ Madrasah Kota Pasuruan
- Keputusan Wali Kota Pasuruan Nomor: 188/297/423.011/2022, Penunjukan Atlit Kegiatan Pekan Olahraga Pelajar Daerah Jawa Timur ke XIII 2022.

Bagian Hukum

Pelaksanaan Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat diukur dengan satu indikator yaitu SKM Pelayanan Hukum. Pada tahun 2022 ditargetkan sebesar 80% dan terealisasi 80% sehingga capaiannya sebesar 100%. Capaian ini berdasarkan data survey tentang kepuasan terhadap pelayanan yang telah dilakukan oleh bagian hukum kepada 173 responden dari berbagai Perangkat Daerah di Kota Pasuruan. Pada survey tersebut

diperoleh bahwa sebanyak 20,9% menyatakan pelayanan yang diberikan sangat baik (nilai A) dan 62,8% menyatakan baik (nilai B). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pelayanan yang diberikan pada Bagian Hukum adalah baik (B)/80. Ketercapaian target indikator ini oleh kerjasama yang baik antar Pegawai Bagian Hukum dalam melayani permohonan produk hukum daerah dan peningkatan penyediaan pelayanan produk hukum melalui website.

Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat didukung oleh satu Kegiatan yakni Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum yang diukur dengan indikator Persentase Ketercapaian Kinerja Sub Kegiatan yang terlayani di bidang Hukum dengan target sebesar 90% dan terealisasi sebesar 96,65% sehingga capaiannya sebesar 111,53%. Hal ini berdasarkan pada 12 indikator yaitu 8 indikator sesuai dengan target 100% dan terealisasi sebesar 100% sehingga capaiannya sebesar 100%. Capaian ini berdasarkan kerjasama dan komunikasi yang baik antar Perangkat Daerah di Pemerintah Kota Pasuruan. Sedangkan 4 indikator tidak sesuai target antara lain Peraturan Daerah masih menunggu jadwal fasilitasi dari Biro Hukum Provinsi Jawa Timur, Pembuatan Naskah Akademik Peraturan Daerah didukung dikarenakan belum adanya peraturan pelaksanaannya, terkait Bantuan Hukum untuk masyarakat karena tidak adanya permohonan proposal pengajuan bantuan hukum yang diajukan, sedangkan himpunan produk hukum daerah dicetak sesuai dengan kebutuhan.

Bagian Administrasi Pemerintahan

Bagian Administrasi Pemerintahan dengan Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat diukur dengan dua indikator yaitu :

Persentase kebijakan bidang pemerintahan yang ditindaklanjuti PD. Pada tahun 2022 ditargetkan sebesar 80% dan terealisasi 77,81% sehingga capaiannya sebesar 97,26%. Capaian ini berdasarkan data jumlah indikator urusan pada kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan, terealisasi 71 indikator dari 73 indikator. Indikator urusan terbagi antara lain pelaksanaan Forkopimda sejumlah 12 terealisasi 10, Koordinasi Pimpinan Eksekutif dan Pimpinan Legeslatif sejumlah 2 terealisasi 2, Penyusunan LPPD Kota Pasuruan TA. 2021 sejumlah 36 terealisasi 36, Penyusunan Standar Pelayanan Maksimal sejumlah 6 terealisasi 6, Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Harjaprov ke 77 di Kota Pasuruan sejumlah 1 terealisasi 1, Koordinasi Kinerja Kecamatan sejumlah 2 terealisasi 2, Pembinaan Evaluasi Kelurahan

sejumlah 8 terealisasi 8, Pembinaan Pengembangan Kapasitas Aparatur Kelurahan sejumlah 1 terealisasi 1 dan Koordinasi Profil Kelurahan sejumlah 5 terealisasi 5.

Ketidak ketercapaian ini disebabkan karena menyesuaikan agenda pimpinan daerah dan jajaran samping.

Indikator yang kedua yaitu Persentase fasilitasi kerjasama yang ditindaklanjuti PD. Pada tahun 2022 ditargetkan sebesar 80% dan terealisasi 80 % atau tercapai 100%. Capaian ini berdasarkan data jumlah indikator urusan pada kegiatan Fasilitasi Kerjasama Daerah terealisasi 32 indikator dari 32 indikator. Indikator urusan terbagi antara lain kerjasama yang diujai sejumlah 30 terealisasi 30, Pertemuan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) sejumlah 2 terealisasi 2.

Ketercapaian target indikator ini didukung oleh tingkat koordinasi yang baik dengan Perangkat Daerah.

Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat didukung oleh 2 (dua) Kegiatan yakni :

Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan yang diukur dengan indikator Persentase rata-rata ketercapaian pelaksanaan program dukungan sasaran PD dengan target sebesar 80% dan terealisasi sebesar 77,81% sehingga capaiannya sebesar 97,26%. Capaian ini berdasarkan jumlah pelaksanaan Forkopimda yang terlaksana sejumlah 10 kegiatan dari total 12 kegiatan, Jumlah Koordinasi Pimpinan Eksekutif dan Pimpinan Legislatif yang terlaksana sejumlah 2 kegiatan dari total 2 kegiatan, Jumlah urusan dalam LPPD Kota Pasuruan TA. 2021 terlaksana sejumlah 36 urusan dari total 36 urusan, Jumlah Urusan dalam Standar Pelayanan Maksimal terlaksana sejumlah 6 urusan dari total 6 urusan, Kegiatan Fasilitasi Harjaprov ke 77 di Kota Pasuruan terlaksana sejumlah 1 kegiatan dari total 1 kegiatan, Jumlah Rapat Koordinasi Kinerja Kecamatan terlaksana sejumlah 2 kali rapat dari total 2 kali rapat, Jumlah Rapat Pembinaan Evaluasi Kelurahan terlaksana sejumlah 8 kali rapat dari total 8 kali rapat, Jumlah Rapat Pembinaan Pengembangan Kapasitas Aparatur Kelurahan terlaksana sejumlah 1 kali rapat dari total 1 kali rapat dan Jumlah Rapat Koordinasi Profil Kelurahan terlaksana 5 kali rapat dari total 5 kali rapat. Ketercapaian indikator ini didukung oleh adanya regulasi Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan

Minimal, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Profil Desa dan Kelurahan, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan.

Ketidak ketercapaian target indikator ini dikarenakan menyesuaikan agenda pimpinan daerah dan jajaran samping.

Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Daerah diukur dengan indikator Persentase rata-rata ketercapaian pelaksanaan program dukungan sasaran PD dengan target sebesar 80% dan terealisasi sebesar 80% sehingga capaiannya sebesar 100%. Capaian ini berdasarkan data program, kegiatan dan sub kegiatan beserta target indikatornya telah terisi pada RKPD dan Rencana Kerja Perangkat Daerah. Ketercapaian target indikator didukung Jumlah peluang kerjasama yang dijabaki terlaksana sejumlah 30 kali rapat peluang kerjasama dari total 30 kali rapat peluang kerjasama, Jumlah pertemuan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) terlaksana sejumlah 2 kali pertemuan dari total 2 kali pertemuan. Ketercapaian target indikator ini disebabkan tingkat koordinasi yang baik dengan Perangkat Daerah.

Bagian Protokol

Bagian Protokol dengan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota diukur dengan *satu* indikator yaitu Persentase Layanan Kebutuhan Pimpinan yang Terfasilitasi. Pada tahun 2022 ditargetkan sebesar 90% dan terealisasi 90% sehingga capaiannya sebesar 100%. Capaian ini berdasarkan data jumlah layanan kebutuhan pimpinan yang terfasilitasi tahun 2022 sejumlah 102 permintaan dari total jumlah layanan kebutuhan pimpinan sejumlah 107 permintaan. Bentuk permintaan fasilitasi layanan dari perangkat daerah penyelenggara suatu acara yang mengundang Kepala Daerah berupa surat permintaan yang ditindaklanjuti Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan dengan mengirimkan personil untuk memfasilitasi kehadiran Wali Kota, Wakil Wali Kota dan Forkopimda Kota Pasuruan. Ketercapaian target indikator didukung oleh setiap pegawai memiliki motivasi kerja yang tinggi dan kerjasama yang baik.

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota didukung oleh satu Kegiatan yakni Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan yang

diukur dengan indikator Persentase Perangkat Daerah yang terlayani di bidang keprotokolan dan komunikasi pimpinan dengan target sebesar 90% dan terealisasi sebesar 90% sehingga capaiannya sebesar 100%. Capaian ini berdasarkan jumlah perangkat daerah yang terlayani di bidang keprotokolan dan komunikasi pimpinan sejumlah 38 perangkat daerah dari total perangkat daerah di Pemerintah Kota Pasuruan sejumlah 40 perangkat daerah. Hal ini didukung oleh komunikasi yang terjalin baik dengan Perangkat Daerah terkait.

Dari hasil capaian kinerja dan anggaran pada tabel diatas dapat disimpulkan adanya efisiensi penggunaan sumber daya sebagai berikut :

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja Utama | % Capaian Kinerja | % Capaian Anggaran | Tingkat Efisiensi |
|----|--|---|-------------------|--------------------|-------------------|
| 1 | Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah | Nilai Sakip PD | 100% | 91% | 9% |
| 2 | Meningkatnya Tertib Administrasi Pemerintahan | Prosentase Rumusan Kebijakan yang Ditindaklanjuti | 91,41% | 90% | 1,14% |
| | | SKM Pelayanan Sekretariat Daerah | 99,28 Point | 85% | 14,28 |

Tabel 3.8 Kesimpulan Realisasi Anggaran dan Kinerja

BAB 4

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat Daerah Kota Pasuruan Tahun 2022 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas Penyelenggaraan Pemerintah yang baik (good govermen) Sekretariat Daerah Kota Pasuruan tahun 2022. Pembuatan LKjIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKjIP Sekretariat Daerah Kota Pasuruan Tahun 2022 ini dapat menggambarkan keberhasilan Kinerja Sekretariat Daerah Kota Pasuruan dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan. Berdasarkan perjanjian kinerja perubahan Sekretariat Daerah Kota Pasuruan tahun 2022. Ada 2 sasaran strategis yang diwujudkan untuk pencapaian misi Sekretariat Daerah Kota Pasuruan dengan rincian sebagai berikut :

Dari pencapaian misi dengan 2 sasaran strategis dan 3 indikator kinerja sasaran yang dinilai berhasil dan ada pula capaian yang dinilai kurang berhasil. Adapun keberhasilan capaian Kinerja Sekretariat Daerah Kota Pasuruan Tahun 2022 antara lain :

| NO | Sasaran Strategis | Jumlah Indikator sasaran | Rata-rata capaian kinerja sasaran | | | | | | |
|----------|-------------------|--------------------------|-----------------------------------|------------------|-------------|------|-------|--------|---------------|
| | | | | Sangat memuaskan | Sangat baik | baik | cukup | kurang | Sangat kurang |
| Tujuan 1 | | | | | | | | | |
| | Sasaran 1 | 1 | 100% | 4 | 100% | | | | |
| | Sasaran 2 | 2 | 100% | 1 | 100% | | | | |

Dari tabel diatas bisa dilihat bahwa ada 4 indikator sasaran yang masuk kategori sangat berhasil , 0 indikator sasaran masuk kategori berhasil, 0 indikator sasaran masuk kategori cukup, dan 0 indikator masuk sasaran kategori kurang

Akhirnya secara umum dapat disimpulkan bahwa pencapaian target beberapa Indikator Kinerja yang tercantum dalam Renstra Sekretariat Daerah Kota Pasuruan Tahun 2021-2026, dan khususnya untuk Tahun 2022 yang juga dituangkan dalam perjanjian Kinerja perubahan Sekretariat Daerah Kota Pasuruan Tahun 2022 dapat dipenuhi sesuai harapan.

4.2 SARAN

Terhadap Indikator Kinerja yang belum dilakukan pengukuran dan belum memenuhi kriteria indikator yang baik, kami sadari semata-mata karena kelemahan dan ketidak sempurnaan sebagai manusia, namun demikian segala kekurangan dan ketidak sempurnaan tersebut menjadi motivasi kami untuk memperbaiki. dan untuk menyempurnakan Laporan Kinerja ditahun-tahun selanjutnya, kami mohon masukan serta saran dan Evaluator maupun Stakeholder yang berhubungan dengan kami. Semoga Kinerja Sekretariat Daerah Kota Pasuruan semakin meningkat dikemudian hari.

Pasuruan, 31 Januari 2023
SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN

